

ABSTRAK

Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah melakukan berbagai program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama ini kajian mengenai pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi dan UKM lebih menitikberatkan pada kajian ekonomi. Masih sedikit kajian sosial yang mampu menggali kegagalan maupun keberhasilan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM. Padahal akar permasalahan utama justru pada pengorganisasian masyarakat melalui usaha di tingkat keluarga dan komunitas.

Secara sosiologis Public Relation (PR) dapat berperan sebagai komunikasi sosial yang efektif dalam meningkatkan fungsi sosial program Koperasi dan UKM agar dapat diterima bahkan menjadi generator utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peran komunikasi diharapkan berdampak langsung pada masyarakat dan masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam mensukseskan Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM. Untuk itu diperlukan kaji tindak untuk mengembangkan Stratejik komunikasi program pemberdayaan koperasi dan UKM dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM yang sasarannya langsung menyentuh peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan desain strategi komunikasi yang efektif dalam rangka mengkomunikasikan Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM yang dilakukan Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang sasarannya langsung menyentuh peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Metode *kuantitatif* dilakukan dengan teknik survei untuk mengumpulkan data tentang karakteristik stakeholder, latar belakang sosial budaya, kondisi lokal dan aspirasi, opini, kebutuhan masyarakat tentang komunikasi program

pemberdayaan. Metode *kualitatif* dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara mendalam.

Kajian komunikasi dapat menarik kesimpulan penting sebagai hasil temuan lapangan di beberapa lokasi penelitian. Kesimpulan ini dapat dijadikan pedoman untuk memperbaiki secara internal kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM dari program pemberdayaan yang mensejahterakan masyarakat. Keberhasilan program dalam pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh pola komunikasi yang selama ini diupayakan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM di bawah Deputi masing-masing bidang disamping komunikasi yang telah dilakukan secara khusus oleh bagian Kantor Hubungan Masyarakat (Humas).

Temuan studi kajian komunikasi ini adalah: (1) Ada perbedaan pola komunikasi baik di Tingkat Daerah Propinsi, Kabupaten Kota dan Koperasi. Perbedaan baik dari aspek pengetahuan, target sasaran/audiens, aktor, media komunikasi yang digunakan, materi pesan serta hambatan yang dihadapi di lapangan. (2) Perubahan yang diakibatkan kebijakan otonomi daerah sangat berpengaruh pada penguasaan materi sosialisasi khususnya di tingkat Kabupaten Kota. Temuan di lapangan menemukan hambatan akan penguasaan materi sosialisasi meskipun aktor komunikasi pintar namun belum tentu mampu menyampaikan materi terkait dengan program koperasi dengan baik. Hal ini perlu mendapat perhatian karena inti komunikasi efektif terletak pada kemampuan dan pengetahuan aktor menguasai materi program. (3) Frekuensi sosialisasi di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota hanya terbatas dalam rapat-rapat rutin atau kordinasi sehingga terbatas 1-2 kali dalam setahun. Hal ini dirasakan sangat kurang memadai untuk sosialisasi program, apalagi jika terkait kebijakan atau aturan perundang-undangan baru. (4) Di tingkat Kabupaten/kota aktor atau rombongan sosialisasi kadang tidak efisien sebaiknya rombongan benar-benar orang yang memang merupakan tim komunikasi (tidak dalam jumlah besar). (5) Pola komunikasi melalui birokrasi kurang memadai karena

kenyataan di lapangan justru menghambat karena berbelit-belit alias tidak efisien dan efektif. (6) Perlu dipertimbangkan di tingkat Propinsi atau Kabupaten/Kota bentuk komunikasi program melalui penjelasan kepada media massa ("press release") untuk materi komunikasi tertentu yang akan mempengaruhi keberhasilan program. (7) Penggunaan media cetak masih terbatas, padahal media ini dapat disimpan dan memiliki kekuatan menyimpan dalam waktu lama. Kelompok sasaran dapat melihat kembali dari media cetak seperti brosur dan lain-lain terkait informasi program. (8) Di tingkat koperasi pola komunikasi tatap muka paling tinggi dilakukan hal ini perlu dipertahankan. Namun demikian kelompok sasaran menginginkan komunikasi lisan lebih berbentuk dialog atau dua arah sehingga proses interaktif bisa berjalan dengan baik. (9) Materi komunikasi selain mengenai persyaratan atau petunjuk teknis program dan kebijakan kelompok sasaran mengharapkan pula materi pemberdayaan terkait peningkatan kualitas bagi pelaku usaha. (10) Wadah komunikasi berbentuk forum dapat menjadi pendekatan komunikasi tatap muka dan antara kelompok sasaran dan aktor menjadi setara, komunikasi efektif dapat berjalan dengan baik. (11) Aktor komunikasi selama ini dinilai kurang kompeten, kecuali pengurus koperasi di tingkat koperasi. Namun demikian bagi anggota koperasi sebagai pelaku usaha menginginkan aktor justru pejabat pemerintah dari tingkat propinsi atau pusat dan tokoh masyarakat baik formal maupun informal. Menurut mereka aktor ini membawa pengaruh cukup besar. (12) Masih dapat dipertahankan penggunaan bahasa daerah disamping bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bahkan aktor komunikasi perlu memahami kondisi sosial budaya masyarakat. Mengangkat nilai-nilai positif dan norma atau adat istiadat setempat yang dapat mendorong keberhasilan program dalam pengembalian dana maupun membuat jaringan usaha yang lebih luas. (13) Khusus di daerah di luar P. Jawa yang kondisinya jauh berbeda perlu di fokuskan pada pemberdayaan sumberdaya lokal serta frekuensi sosialisasi yang lebih sering dan jangkauan program lebih luas terhadap kelompok sasaran.

Strategi komunikasi sosial program pemberdayaan koperasi dan UKM yang efektif adalah sebagai berikut:

1. Media komunikasi (delivery channel atau media)

Media komunikasi program dilakukan melalui:

a. Rapat rutin

Baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota, rapat rutin dapat digunakan dalam rangka kegiatan program. Rapat rutin umumnya diharidiri oleh semua staf dan merupakan saluran yang baik untuk mensosialisasikan program.

b. Rapat koordinasi

Dapat dilakukan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Rapat koordinasi penting karena dapat mengundang beberapa instansi atau pemangku kepentingan lain yang terkait dengan kegiatan program.

c. Rapat khusus

Rapat khusus dapat dilakukan sewaktu-waktu jika ada permasalahan program yang perlu diungkap baik oleh pusat maupun daerah, bahkan di tingkat pengurus koperasi.

d. Penyuluhan interaktif

Hasil di lapangan menunjukkan bahwa komunikasi tatap muka secara lisan masih sangat efektif dalam arti selalu digunakan terutama di antara anggota koperasi. Namun, para anggota koperasi membutuhkan pendekatan dua arah, sehingga komunikasi bersifat dialog atau interaktif. Dalam hal ini peran aktor menjadi penting atau perlu dipertimbangkan dengan baik. Selama ini seringkali hanya dilakukan oleh pengurus. Materi bisa dipersiapkan namun bagi anggota koperasi bentuk tanya jawab diharapkan lebih ditekankan.

e. Lisan melalui forum

Membentuk forum komunikasi bisa dijadikan alternatif dalam mengorganisasikan anggota koperasi khususnya terkait dengan informasi program. Di dalam forum ini pula dapat dibahas mulai dari kebijakan sampai dengan mekanisme teknis program. Pendekatan melalui forum semua peserta mendapat perlakuan sama ("equal") mendapat kesempatan yang sama tanpa membedakan pejabat pemerintah, pengurus maupun anggota koperasi. Pertemuan pertemuan melalui forum tidak terbatas sehingga semakin sering anggota forum berinteraksi komunikasi yang berlangsung akan semakin efektif.

f. Media elektronik

Dalam hasil kajian sedikit sekali komunikasi yang dilakukan melalui media elektronik karena pertimbangan biaya yang harus dikeluarkan. Meskipun dalam saluran komunikasi media elektronik memiliki kekuatan tersendiri. Di tingkat propinsi sampai ke daerah sebenarnya media elektronik sangat strategik jika digunakan sebagai media komunikasi program selain jangkauannya luas bisa ditayangkan atau disiarkan berkali-kali. Dalam era otonomi daerah tidak ada salahnya mempertimbangkan alokasi dana mengingat kekuatan media elektronik meskipun biaya cukup mahal. Perlu dipilih program unggulan yang betul-betul sesuai dengan sasaran program misal yang langsung ke lapisan terbawah atau kelompok miskin.

g. Media cetak

Media cetak adalah salah satu saluran komunikasi yang dapat digunakan selain pertemuan atau bentuk-bentuk media komunikasi lain. Bahkan ini dapat dijadikan pelengkap. Kekuatan dari media cetak lebih tahan lama dan dapat digunakan atau

dibaca kembali jika informasi diperlukan. Media cetak dapat dalam bentuk brosur, leaflet, dan sebagainya.

2. Aktor komunikasi (sender)

Aktor komunikasi atau pemberi komunikasi yang potensial adalah:

a. Pejabat pemerintah (propinsi maupun kabupaten/kota)

Di tingkat propinsi dan daerah kabupaten/kota, pejabat pemerintah adalah aktor komunikasi program. Hasil kajian mengidentifikasi seringkali aktor yang mensosialisasikan program justru kurang menguasai program itu sendiri bahkan kegiatan koperasi pada umumnya. Ditemukan pula bahwa pada era otonomi daerah seringkali ada pergantian pejabat yang tidak memiliki kompetensi di bidang koperasi sehingga hambatan utama pada penguasaan materi. Kondisi ini akan berakibat fatal pada komunikasi program. Saran yang dapat dilakukan antara lain baik di tingkat propinsi maupun daerah kabupaten/ kota memiliki tenaga khusus yang sudah terlatih dan menguasai ruang lingkup maupun permasalahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil. Tim komunikasi ini akan menjadi aktor komunikasi di lingkungan instansi pemerintah terkait.

b. Tokoh masyarakat

Hasil kajian menemukan bahwa jarang melibatkan tokoh masyarakat sebagai aktor komunikasi program padahal di tingkat anggota koperasi sangat mengharapkan peran tokoh masyarakat sebagai aktor komunikasi. Secara sosiologis peranan tokoh masyarakat akan membawa dampak luas tidak saja sebagai tokoh yang mensosialisasikan program juga memberi dampak tanggung jawab moras dan sosial pada para pelaku usaha agar mau berpartisipasi bahkan memiliki tanggung jawab mengembalikan

dana bergulir program Kementerian Negara Koperasi dan. Tokoh Masyarakat baik formal maupun informal tergantung pada masyarakat lokal siapa yang mereka tokohkan bisa tokoh adat, agama, pemerintah desa, pemuda, pelaku pengusaha.

c. Pengurus koperasi

Pengurus koperasi yang menjadi aktor komunikasi tidak hanya ketua, tapi juga pengurus yang bidangnya relevan, berhubungan dan menunjang dengan program yang akan dilakukan.

d. Pelaku usaha

Pelaku usaha dapat dimunculkan di berbagai saluran komunikasi yang digunakan mulai dari tingkat yang paling bawah yaitu anggota koperasi sampai ketinggian daerah kabupaten/kota dan propinsi.

3. Materi komunikasi (Message)

Materi komunikasi yang diharapkan untuk disampaikan adalah berupa:

a. Materi program

Materi program yang diharapkan selain petunjuk teknis dan kebijakan-kebijakan tentang koperasi, pelaku usaha lebih mengharapkan materi di luar petunjuk teknis dan kebijakan.

Antara lain materi yang terkait seperti yang disebutkan :

" Perlu adanya pembinaan dari Kementerian maupun pemerintah setempat mengenai peningkatan produksi, peningkatan kualitas produk maupun strategi pemasaran"

Informasi lain yang diperlukan koperasi lebih banyak tentang program termasuk jumlah dana yang dapat dipinjam dan semua persyaratan rinci yang diperlukan. Hampir semua koperasi merasa perlu mendapatkan pembinaan sesuai dengan kegiatan usaha masing-masing. Pembinaan dan pendampingan dapat dilakukan

oleh instansi yang terkait sesuai dengan pendampingan yang dibutuhkan (Bisa dengan Departemen Pertanian maupun Industri dan perdagangan). Bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi selain bahasa Indonesia dapat digunakan bahasa daerah setempat tentu ini akan lebih efektif terutama di tingkat komunitas dan sasaran dari program. Selain itu perlu aktor komunikasi harus memahami struktur sosial dan budaya masyarakat setempat. Siapa dan dengan siapa berkomunikasi sangat mempengaruhi seberapa efektif materi dapat sampai pada kelompok sasaran.

b. Kebijakan program

Perlu dipahami mengenai keterkaitan program pemberdayaan koperasi dan UKM dalam lingkup kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM. Kebijakan tentang perkoperasian atau apapun yang terkait dengan program sangat diperlukan baik ditingkat daerah maupun di tingkat koperasi. Kebijakan ini penting untuk diketahui oleh pejabat pemerintah terutama yang paling sering bersentuhan dengan kegiatan sosialisasi program atau komunikasi. Termasuk jika dikeluarkan Undang-undang atau peraturan yang terkait dengan program, paling tidak kumpulan dokumen ini dimiliki oleh koperasi atau difahami bersama baik oleh pemerintah maupun oleh pengurus dan anggota koperasi sebagai pelaku usaha.

4. Penerima komunikasi (receiver)

Yang menjadi target penerima komunikasi atau informasi adalah:

a. Dinas koperasi dan UKM di propinsi dan kabupaten/kota

Komunikasi tidak hanya ditujukan pada kepala dinas, tapi sangat penting ditujukan pada staf di dinas yang bidang kerjanya relevan dengan program dan mendukung kegiatan program.

b. Pengurus koperasi

Selama ini pengurus koperasi memang merupakan penerima komunikasi dari dinas yang berperan untuk menyampaikan informasi kepada para anggota. Pengurus dalam hal ini tidak hanya ketua koperasi, tapi juga pengurus yang menjadi pelaksana sehari-hari dan yang berhubungan langsung dengan anggota koperasi. Mereka perlu dibekali dengan pengetahuan mengenai program, kebijakan koperasi dan UKM, dan juga dibekali dengan strategi dalam menyampaikan komunikasi, menjawab pertanyaan anggota dan menampung keluhan para anggota.

c. Masyarakat luas

Masyarakat luas sudah selayaknya diberi pengetahuan mengenai program-program pemberdayaan yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM, dimana program-program ini bersentuhan langsung dan menjadi kebutuhan masyarakat. Humas dalam Kementerian Koperasi dan UKM dapat banyak berperan dalam menyampaikan program-program yang akan dilakukan (dalam proses sosialisasi sejak awal hingga akhir program), tidak hanya menyampaikan program-program yang dianggap berhasil yang telah dilaksanakan (yang selama ini telah dilakukan).

5. Umpan balik komunikasi (*feedback*)

Umpan balik dalam menjadi salah satu bagian krusial dalam proses komunikasi, oleh karena itu kegiatan pemberian umpan balik perlu dilakukan secara terencana dalam setiap program.

a. Pelaksana

Umpan balik perlu dilaksanakan pada setiap level yaitu di level kementerian, propinsi, kabupaten/kota dan koperasi. Setiap level

akan memberi dan menerima umpan balik. Sebagai contoh, dinas koperasi memberi umpan balik kepada kementerian, dan dinas propinsi menerima umpan balik dari dinas kabupaten/kota.

b. Materi

Materi dalam kegiatan umpan balik minimal mencakup lima komponen atau unsur penting dalam komunikasi program yaitu mengenai pengirim pesan (*sender*), pesan yang dikirimkan (*message*), bagaimana pesan tersebut dikirimkan (*delivery channel atau media*), penerima pesan (*receiver*), dan umpan balik (*feedback*).

Pelaksanaan salah satu kegiatan komunikasi program dilakukan dalam bentuk *press conference* dengan target jurnalis atau wartawan media cetak maupun elektronik. Pemilihan bentuk kegiatan ini adalah agar informasi dapat disebarkan kepada publik secara luas melalui Koran, majalah ataupun internet. Keunggulan media cetak dari sudut pandang penyampai informasi adalah jangkauan informasi luas, informasi dapat dibaca oleh banyak orang dan berulang-ulang, dan biaya produksi yang murah. Sedangkan keunggulan media ini bagi penerima informasi adalah dapat digunakan oleh banyak orang dan biaya untuk memperolehnya murah.

Kementerian Negara Koperasi dan UKM dapat menggunakan bentuk kegiatan *press conference* dalam menyampaikan program pemberdayaannya. Selama program pemberdayaan berlangsung, kegiatan *press conference* dapat dilakukan beberapa kali dengan tujuan untuk memberikan informasi secara berkesinambungan dan sebagai media untuk “reminder” bagi masyarakat luas.

Kegiatan *press conference* yang telah dilakukan dalam kajian komunikasi ini melibatkan sepuluh (10) media cetak nasional yaitu Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Suara Pembaruan, Koran Tempo, Warta Kota, Berita Kota, majalah InfoBank, Harian Terbit, majalah Kewirausahaan, Radio Republik Indonesia (RRI) Online dan Monitor Depok. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal

10 Desember 2007 yang bertempat di Gedung Pertemuan Pascasarjana UI, Salemba, Jakarta Pusat.

Evaluasi terhadap kegiatan *press conference* menunjukkan bahwa pemilihan tema dan isi informasi tentang koperasi dan UKM kurang menarik perhatian publik. Terdapat kecenderungan para wartawan mencari informasi yang faktual dan memiliki nilai jual.

Saran bagi perbaikan kegiatan komunikasi program yaitu dengan tetap menggunakan media cetak maupun elektronik sebagai sarana penyampaian program informasi tentang program pemberdayaan. Bentuk penyampaian informasi dapat menggunakan advertorial secara berkesinambungan.

Hal-hal yang dipaparkan di atas lebih diperuntukkan bagi target group masyarakat luas. Sementara itu, bagi gerakan koperasi kegiatan komunikasi yang efektif dilakukan dengan cara pembinaan dan kaderisasi bagi gerakan koperasi secara terus menerus melalui dialog dua arah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia, koperasi memiliki peranan yang cukup berarti. Dari beberapa hasil studi kasus tentang koperasi memperlihatkan bahwa keberadaan koperasi tidak saja menguntungkan pada anggota koperasi tetapi juga telah berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik untuk komunitas dimana koperasi tersebut berada. Keberadaan dan perkembangan koperasi khususnya koperasi yang responsif gender di Indonesia cukup menarik perhatian pemerintah maupun para pembina karena koperasi-koperasi tersebut menunjukkan perkembangan kinerja yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sisi organisasi maupun usaha. Terdapat perdebatan mengenai pengertian koperasi yang berperspektif gender. Namun untuk kepentingan studi pendataan ini koperasi yang berperspektif gender secara umum diberikan pengertian sebagai koperasi yang memiliki orientasi pada pemenuhan kebutuhan dan persoalan perempuan. Masuk dalam pengertian tersebut adalah koperasi umum (bukan koperasi khusus wanita) dan koperasi wanita. Namun dengan pertimbangan teknis berupa jumlah koperasi yang besar sekali jumlahnya maka untuk kepentingan studi pendataan ini dengan berbagai persoalan teknis (waktu dan juga biaya) maka studi ini sejak awal difokuskan pada koperasi wanita (selanjutnya disingkat dengan kopwan). Dengan asumsi bahwa kopwan pada umumnya memiliki kegiatan yang diorientasikan kepada pemenuhan kebutuhan dan pemecahan persoalan wanita baik yang bersifat konsumtif, produktif maupun kesehatan reproduksi.

Keberadaan kopwan sangat menarik untuk dilihat karena terdapat beberapa kopwan yang cukup berkembang. Hal ini dapat dilihat secara kuantitas seperti peningkatan jumlah anggota, volume usaha dan peningkatan SHU sedangkan jika dilihat dari kualitas pengelolaan, koperasi wanita lebih konsisten dan memberikan dampak positif untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Hal ini

salah satunya dicontohkan dengan diadakannya unit simpan pinjam yang dikelola oleh wanita di beberapa Propinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Sumatera Barat yang berkembang cukup pesat. Keberhasilan pengelolaan unit simpan pinjam tersebut tidak saja menguntungkan kopwan yang bersangkutan, tetapi juga anggota kopwan dan juga keluarga dan komunitas dimana kopwan tersebut berdiri. Karenanya, secara lebih khusus peranan wanita dalam koperasi perlu didorong dengan beberapa alasan berkaitan dengan: (1) peranan wanita dalam peningkatan kesejahteraan diri dan keluarganya. Dengan kata lain terdapat peranan yang besar wanita dalam pengentasan kemiskinan (2) .Kebutuhan wanita untuk memberdayakan diri (aktualisasi diri) agar dapat berperan lebih besar di luar posisinya sebagai ibu rumah tangga (kesimpulan dari panel diskusi tanggal 4 April 2006 yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK).

Dalam kaitan dengan pemberdayaan dan peningkatan peranan wanita dalam koperasi, Pemerintah khususnya Kementerian Negara Koperasi dan UKM sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang telah melaksanakan berbagai program. Salah satunya adalah Program Peningkatan Peran Perempuan melalui Koperasi dan UKM. Program lainnya adalah pada tahun 2004/2005 pemerintah telah melaksanakan Program Rintisan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil yang Responsif Gender melalui perguliran dana perkuatan modal usaha kepada kelompok usaha mikro dan kecil khususnya wanita yang memiliki usaha produktif seperti KSP/USP dengan pola tanggung renteng. Program tersebut dijalankan secara meluas mencakup 30 propinsi yaitu NAD, Sumut, Riau, Jambi, Sumbar, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung, Jabar, Banten, DKI Jakarta, Jateng, D.I.Yogyakarta, Jatim, Bali, Kalsel, Kaltim, Kalteng, Kalbar, NTB, NIT, Sulsei, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Sulut, Maluku, dan Maluku Utara.

Berdasar pada alasan-alasan di atas dan kaitan dengan implementasi program-program pemerintah seperti juga disebutkan di atas, maka mutlak dibutuhkan data yang valid dan akurat untuk dapat menggambarkan pertumbuhan dan

perkembangan kopwan. Dengan tersedianya data tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran yang baik tentang kopwan baik dalam aspek organisasi maupun dalam pelaksanaan usaha. Ketersediaan data tersebut sangat dibutuhkan sebagai dasar dalam menentukan atau membuat kebijakan pengembangan koperasi yang responsif gender ke depan. Data mengenai kopwan juga sangat penting posisinya karena tanpa data yang cukup baik sulit untuk melihat secara mendetail persoalan yang dihadapi maupun solusi yang ditawarkan dari pihak pengambil kebijakan.

Mengapa Kopwan?

Keberhasilan kopwan digambarkan dengan kemajuan yang telah dicapai oleh dua kopwan yang ada di Pulau Jawa yaitu: (i) Koperasi Setia Bhakti Wanita (KSBW) di Surabaya. Faktor yang keberhasilannya diantaranya ditentukan oleh sistem tanggung renteng dalam pengelolaan dana bergulir. Keberhasilan yang dicapainya tersebut telah mendorong, Kementerian Negara Koperasi dan UKM mereplikasikan sistem tanggung renteng kepada 30 kelompok di 30 propinsi di Indonesia dengan menyediakan dana bergulir sebesar Rp 225 juta atau Rp 7,5 juta per kelompok. (ii) Kopwan Kartika Chandra Pandaan (KCP) yang dinilai sehat dari segi pengelolaan dan besarnya omset. Indikator keberhasilannya dapat dilihat dari melalui kepemilikan supermarket, kenaikan simpan pinjam, kepemilikan pertokoan, persewaan dan sebagainya yang dicapai antara tahun 2003 – 2004 lalu.

Dalam konteks kasus tersebut nampak bahwa wanita memiliki keunggulan khususnya dalam pengelolaan koperasi. Keunggulan tersebut mewujud dalam keuletan, kejujuran dan ketelitian dalam menangani berbagai dinamika persoalan kopwan. Kasus keberhasilan di atas memperkuat alasan untuk melakukan penelitian atau pendataan mengenai kopwan. Melalui proses penelitian ini diharapkan dapat dipetik pembelajaran dari keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai kopwan. Pembelajaran tersebut diharapkan berguna untuk pemerintah

sebagai pengambil kebijakan, dan pihak-pihak lain yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam mendorong perkembangan kopwan di masa mendatang. .

1.2. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan TOR penelitian, tujuan studi pendataan ini adalah:

- 1) Memperoleh data kuantitatif tentang Kopwan di 30 Propinsi di Indonesia.
- 2) Mendapatkan gambaran kualitatif tentang perkembangan Kopwan di Indonesia, yang diperoleh melalui pemilihan beberapa studi kasus.

1.3. Sasaran dan Indikator Keluaran

Sasaran dari pendataan kuantitatif ini adalah (1) tersusunnya profil kopwan di 30 propinsi (2) bahan masukan bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan peran wanita melalui koperasi.

Indikator keluaran sesuai dengan acuan TOR adalah diperolehnya data koperasi wanita yang meliputi :

- (1) Sebaran koperasi berdasarkan jenis/identitas
- (2) Sebaran koperasi sekunder berdasarkan jenis/identitas
- (3) Keaktifan koperasi berdasarkan jenis/identitas
- (4) Keaktifan Koperasi berdasarkan Propinsi
- (5) Jumlah Anggota koperasi berdasarkan jenis/identitas
- (6) Jumlah volume Usaha Per-Koperasi
- (7) Jumlah Sisa Hasil Usaha Per-Koperasi
- (8) Jumlah Permodalan: Modal sendiri dan Modal Luar dan Sumber permodalan per-Koperasi
- (9) Jumlah Aset Per-Koperasi
- (10) Kemitraan koperasi secara horizontal dan vertikal
- (11) Partisipasi Anggota
- (12) Penyerapan Tenaga Kerja rata-rata per-Koperasi
- (13) Jumlah Pengurus dan pendidikan per-koperasi
- (14) Masalah-masalah koperasi wanita per-Propinsi

1.4. 1. Metode Penelitian

Dalam kaitan dengan studi pendataan ini dirumuskan beberapa batasan operasional yang digunakan dalam studi ini. Batasan operasional tersebut adalah :

Batasan Operasional:

1. Koperasi yang dimaksud dalam studi ini adalah koperasi berdasarkan UU Koperasi No 12/1967 yaitu sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas-asas kekeluargaan.
2. Koperasi berperspektif gender adalah koperasi (primer)¹ dan berbadan hukum yang pengurus atau anggotanya sebagian adalah wanita dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau dikembangkan diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan wanita dan juga memecahkan persoalan yang dihadapi wanita.

Seperti yang telah diulas pada bagian awal latar belakang laporan ini bahwa karena beberapa alasan waktu dan biaya, maka penelitian ini hanya akan memfokuskan pada kopwan. Pengertian kopwan disini adalah koperasi yang secara spesifik dalam anggaran dasarnya menhususkan diri sebagai kopwan yang ditandai dengan anggota maupun pengurusnya sebagian besar adalah wanita.

3. Koperasi aktif dan Koperasi tidak aktif;
 - a. Koperasi dimana kepengurusan, keanggotaan maupun kegiatannya berjalan secara rutin.

¹ *Koperasi Primer* adalah koperasi yang anggotanya orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dan melakukan kegiatan usaha yang langsung melayani langsung para anggotanya. Sedang *Koperasi Sekunder* adalah yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi karena kesamaan kepentingan ekonomi mereka berfederasi (bergabung) untuk tujuan efisiensi dan kelayakan ekonomi dalam rangka melayani para anggotanya.

4. Koperasi wanita dilihat secara kuantitatif dan kualitatif
 - a. Secara kuantitatif lebih mengacu pada keberadaan dari sisi jumlah kopwan yang ada di 30 propinsi sebagai wilayah basis pendataan.
 - b. Secara kualitatif yaitu melakukan penggalian informasi yang sifatnya lebih mendalam dari beberapa kopwan yang berhasil dan terpilih untuk melihat sejauhmana aktivitas, dinamika kepengurusan, keanggotaan maupun kegiatan membantu memberdayakan perempuan dalam kaitan dengan peningkatan kesejahteraan diri dan keluarganya. Penggalian mendalam ini diharapkan dapat menghasilkan *lessons learn* atau pembelajaran bagi koperasi-koperasi yang lainnya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner dan form isian ke seluruh Kakanwil Koperasi di 31 propinsi. Penelitian ini juga didukung dengan metode kualitatif berupa pengambilan studi kasus sebanyak 10 kopwan di 8 Propinsi yang tersebar di wilayah Jawa dan Luar Jawa.

Pengambilan studi kasus didasarkan pada hasil pendataan kuantitatif untuk menentukan koperasi yang baik. Pemilihan studi kasuspun ditetapkan berdasarkan rujukan dari Dinas Koperasi di tingkat Propinsi maupun Kabupaten. Dengan metode pemilihan kopwan tersebut maka dapat diperoleh kopwan yang terbaik sehingga dapat diperoleh pembelajaran positif dari kopwan yang memiliki kinerja yang baik.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive. Kabupaten yang dipilih mempunyai ciri bahwa kabupaten bersangkutan paling banyak memiliki kopwan, dan di Kabupaten bersangkutan terdapat kopwan yang berhasil . Ciri kopwan yang baik yaitu : kopwan tersebut mampu: (1) mengelola organisasi koperasi dengan baik, (2) mengelola usaha dengan baik, (3) memupuk dan mengelola modal, (4) memiliki jaringan antarkopwan ,anggota dan pihak ketiga.

Jenis responden dan jumlah responden

Responden dalam penelitian kuantitatif ini adalah (1) Staf/ karyawan Kakanwil Koperasi di Tingkat Propinsi , (2) Staf/ karyawan Kantor Koperasi di Tingkat Kabuapten.

Sementara dalam penelitian kualitatif, informan terdiri dari : (1) pengurus kopwan, (2) pegawai kopwan, (3) anggota kopwan yang aktif, (4) anggota kopwan yang tidak aktif dan (5) pihak-pihak lain yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam perkembangan kopwan di wilayah setempat ; masyarakat, jaringan kopwan, dll.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Di sini disusun seperangkat pertanyaan untuk diajukan kepada responden. Kuesioner ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara tertulis dari responden berkaitan dengan tujuan penelitian.

Observasi. Penelitian ini (khususnya kualitatif) melakukan pengamatan untuk mengetahui lebih jelas aktivitas dan dinamika koperasi secara lebih langsung dan mendalam.

Wawancara mendalam. Dalam penelitian ini juga telah dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan dari beberapa komponen koperasi yang dianggap penting dan strategis seperti pengurus koperasi, pendiri koperasi, anggota koperasi aktif, anggota koperasi tidak aktif, karywan koperasi, dll. Informasi tersebut dituangkan dalam 10 studi kasus yang dipilih dalam penelitian ini (seperti diulas di bagian sebelumnya)

Variabel yang diamati dalam penelitian ini terdiri dari :

Jumlah volume usaha per kopwan

Jumlah SHU (sisa hasil usaha) per kopwan
Jumlah permodalan baik modal sendiri maupun modal luar
Jumlah aset per kopwan
Sebaran kopwan primer berdasarkan jenis/identitas
Keaktifan koperasi berdasarkan jenis/identitas
Keaktifan kopwan berdasarkan propinsi
Kemitraan koperasi secara horizontal dan vertikal
Partisipasi anggota
Penyerapan tenaga kerja rata-rata per-kopwan
Jumlah pengurus dan pendidikan per-kopwan
Masalah-masalah kopwan per-Propinsi

Metode Analisis

Data sekunder maupun data primer yang telah berhasil dikumpulkan dikelompokkan sesuai pengelompokan tabulasi data, untuk kemudian diolah secara deskriptif dan korelasi dengan SPSS. Data yang dihasilkan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif.

Analisis kualitatif dilakukan dengan menganalisa data yang berasal dari hasil wawancara mendalam. Seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa penelitian ini mengambil 10 (sepuluh) studi kasus kopwan. Berdasarkan analisis studi kasus diharapkan diperoleh gambaran mengenai sosok kopwan dan dinamikanya. Hasil analisis menghasilkan pembelajaran (*lessons learned*) dari kopwan yang dianggap berhasil. Dari hasil analisa kuantitatif dan kualitatif akan disusun profil kopwan yang berhasil dan dibuat *assasment* sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan peran wanita melalui koperasi. Dari penelitian ini dipilih 10 studi kasus kopwan beserta propinsinya sebagaimana terlihat pada tabel 1 berikut :

TABEL 1.1.

PROVINSI DAN NAMA KOPWAN SEBAGAI STUDI KASUS

PROVINSI	KABUPATEN	KOPWAN YANG MENJADI STUDI KASUS
Jakarta	Jakarta Pusat	Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu (K3I)
Jawa Barat	Kuningan	Permata
Jawa Timur	Pasuruan	a. Dian Wanita
	Surabaya	b. Setia Bhakti Wanita
Maluku	Kota Ambon	a. Kiwalima Jaya
	Kota Ambon	b. Panggayo Maju
NTB		Annisa
Sumatra Utara		Eka Bhakti
Sumatera Selatan		Petra
Bali		Kartini

Lokasi Penelitian

Pada awal perencanaan penelitian ini dirancang untuk melakukan penelitian di 30 propinsi, namun pada pelaksanaannya terkumpul data dari 31 propinsi. Lokasi propinsi yang menjadi wilayah penelitian ini adalah : NAD, Sumut, Riau, Jambi, Sumbar, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung, Jabar, Banten, DKI Jakarta, Jateng, D.I. Yogyakarta, Jatim, Bali, Kalsel, Kaltim, Kalteng, Kalbar, NTB, NTT, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulbar, Gorontalo, Sulut, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

1.5. Struktur Laporan

Laporan penelitian ini dibagi dalam 3 bab, dimana detail isi masing-masing bab adalah sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, tujuan, sasaran dan indikator keluaran.
2. Bab II : Berisi tentang kerangka teoritik dan metode yang dipakai sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

3. Bab III : Temuan Lapangan

1) Analisis Kuantitatif mencakup gambaran yang diperoleh dari lapangan yang terkait :

a Data deskriptif diantaranya menggambarkan :jumlah kopwan 2006, sebaran terbanyak dan yang terkecil, RAT, jumlah anggota secara keseluruhan, jumlah anggota per koperasi, keberadaan manajemen dalam kopwan, jumlah karyawan (baik perempuan dan laki-laki), petugas lapangan, total modal koperasi, total modal sendiri --terbesar dan yang terkecil--, total modal luar --terbesar dan yang terkecil--, total volume usaha, total SHU per koperasi dan jenis usahanya.

b Data *cross variabel*

2) Analisis Kualitatif meliputi informasi mengenai (i) basis sosial, (ii) kapitalisasi, (iii) rekapitalisasi, (iv) manfaat koperasi.

4. Bab IV : Kesimpulan dan Rekomendasi.

1) Kesimpulan terdiri dari kelemahan dan kekuatan kopwan.

2) Rekomendasi meliputi penyempurnaan dan usul : (i) perbaikan sistem pendataan; (ii) manajemen usaha / organisasi; (iii) penataan dinas koperasi di tingkat kabupaten dan provinsi; (iv) kaderisasi / membership education; (v) gabungan / federasi kopwan supaya jadi kekuatan nasional; (vi) capacity building; (vii) aktualisasi diri perempuan dalam kegiatan koperasi.

5. Lampiran yang terdiri dari kuersioner, hasil pengolahan data kuantitatif

BAB II

KERANGKA PIKIR

2.1. Kerangka Pikir

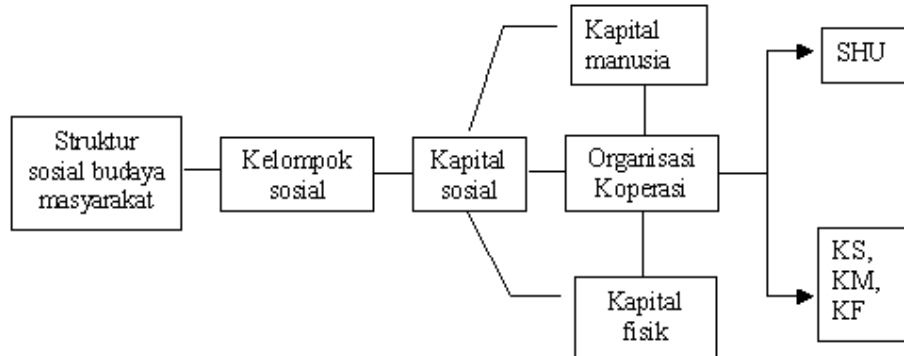
Keberadaan dan keberhasilan koperasi tidak dapat dilepaskan dari konsep kepercayaan (*trust*) dari anggotanya. Dalam hal ini ada prinsip resiprositi dan hubungan resiprokal yang berkembang dalam konteks bekerjanya prinsip kebersamaan dalam kegiatan koperasi menjadi aspek yang sangat penting. Pengertian resiprositi dalam hal ini mengacu pada hubungan timbal balik dalam arti materi atau immateri, juga menunjuk pada hubungan pertukaran yang sebetulnya terbentang mulai dari yang paling tidak jelas pengukurannya sampai dengan jelas pengukurannya, mulai dari yang langsung sampai ke yang tidak langsung (Lawang; 2005;234). Dalam hal ini kepercayaan antara koperasi dengan anggotanya terbangun jika kedua belah pihak saling memenuhi ekspektasi dari keduanya. Anggota akan percaya terhadap koperasi jika koperasi mampu memenuhi ekspektasi kebutuhan anggotanya melalui mekanisme yang memenuhi prinsip-prinsip perkoperasian yang menjadi telah menjadi kesepakatan .. Dengan kata lain bahwa koperasi akan dipercaya oleh anggotanya jika harapan-harapan anggotanya dapat dipenuhi tanpa membedakan apapun, termasuk perbedaan jenis kelamin. Sebaliknya koperasi ada, bertahan dan berkembang jika anggotanya memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Permasalahan umum koperasi pada dasarnya relatif sama. Yang menarik adalah apakah kaum wanita (sebagai kategori sosial) mempunyai kekuatan atau potensi tertentu sehingga koperasi yang dikelola wanita dapat berjalan lebih baik atau tidak. Dalam konteks penelitian dan pendataan ini, dirumuskan persoalan yang dihadapi kopwan di Indonesia. Permasalahan kopwan dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu *pertama*, permasalahan (*subject matter*) yang menunjuk pada apa saja yang memungkinkan berjalannya kegiatan kopwan. *Kedua*, permasalahan dalam pengertian masalah (*problem*)

yang dihadapi kopwan. Permasalahan pertama dalam konteks penelitian ini dipadatkan dalam beberapa konsep: (i) Kapitalisasi dalam bidang fisik, manusia dan sosial; (ii) Rekapitalisasi dalam ketiga aspek tersebut, baik dalam rangka mempertahankan maupun meningkatkan fungsinya; (iii) Kesejahteraan para anggota kopwan dalam arti yang luas. Artinya, koperasi tidak hanya memberi keuntungan ekonomi, melainkan juga menjadi wadah bagi proses partisipasi dan aktualisasi wanita. Sedangkan permasalahan kedua (*problem*) dijelaskan dengan konsep dekapitalisasi dalam kegiatan bidang KS (Kapital Sosial), KM (Kapital Manusia), dan KF (Kapital Fisik). Penjelasan mengenai konsep-konsep di atas dalam konteks kopwan adalah sebagai berikut :

Kapitalisasi merupakan proses bagaimana Kapital Fisik (KF), Kapital Manusia (KM) dan Kapital Sosial (KS) yang ada dalam koperasi itu pada mulanya diperoleh, sehingga koperasi itu terbentuk, berjalan hingga sekarang. Secara hipotetik proses itu mulai dari KS yang sudah ada (tertambat) pada kelompok sosial wanita seperti arisan, atau kelompok sosial biasa atau koperasi yang anggotanya adalah kaum wanita yang ada di sekitarnya. Jadi, KS dalam konteks koperasi diartikan sebagai kelompok sosial yang berbasis teritorial. Secara sederhana kerangka konseptual yang digunakan seperti terlihat dalam gambar berikut ini. Kerangka konseptual tersebut nampak terbukti dari studi kasus-studi kasus yang diteliti (*lihat bab pembahasan*).

Gambar 2.1.
Kerangka Konseptual



Di dalam masyarakat sebagai sebuah komunitas, memiliki struktur sosial yang terbentuk baik secara demografis maupun administratif. Komunitas dibangun oleh berbagai aspek yaitu : budaya, agama dan adat yang bersifat homogen maupun heterogen. Dalam kajian ini, kelompok masyarakat dilihat secara lebih spesifik dalam bentuk kelompok-kelompok sosial, seperti perkumpulan ibu-ibu arisan, pengajian, usaha dan lain-lain. Kelompok ini biasanya dibentuk karena adanya kapital sosial. Kapital sosial yang dimiliki melahirkan *trust* diantara anggota kelompok sebagai dasar terbangunnya organisasi yang mapan. Organisasi di sini nantinya adalah organisasi koperasi yang didukung dengan keberadaan kapital fisik dan kapital manusia. Kapital yang ada, yakni Kapital Sosial (KS), Kapital Fisik (KF) dan Kapital Manusia (KM) pada akhirnya akan menjadi rekapitulasi yang dapat diperoleh oleh seluruh anggota kelompok (organisasi koperasi) disamping Sisa Hasil Usaha (SHU). Secara rinci, gambaran kerangka pikir di atas dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Masyarakat yang dimaksudkan di sini menunjuk pada masyarakat lokal dalam bentuk komunitas (desa, kampung, RT, RW dan sebagainya). Dalam komunitas selalu ada unsur-unsur berikut ini :
 - a Demografis (penduduk) yang secara resmi terdaftar di situ.
 - b Struktur sosial budaya yang mengacu pada struktur sosial budaya lokal seperti Maluku, Jawa (untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur), Palembang

untuk Sumatra Selatan, berbagai struktur sosial untuk Sumatra Utara, Sasak untuk NTB (Lombok), berbagai struktur sosial untuk Jakarta.

- 2) Kelompok sosial menunjuk pada kumpulan orang yang membentuk struktur sosial kelompoknya sendiri dengan macam-macam bentuk seperti kelompok arisan, kelompok pengajian, kelompok usaha, kelompok perempuan termasuk kopwan.
 - 3) Kapital sosial tertambat pada struktur sosial yang berbeda untuk setiap kasus. Rasa saling percaya, atau ketaatan pada norma dan sanksi, kekuatan jaringan antar anggota atau antarkelompok merupakan wujud dari KS. Aspek-aspek tersebut ditemukan di berbagai kasus (khususnya penelitian kualitatif). Dari studi kasus yang diambil, menunjukkan KS mempunyai fungsi yang sangat positif dalam pengembangan kopwan.
 - 4) Kapital Fisik menunjuk pada sarana dan prasarana yang dimiliki atau yang dapat diakses oleh anggota koperasi sehingga dapat melaksanakan kegiatan koperasi sehari-hari. Dalam konteks keberadaan kopwan, KF berwujud pada kantor, peralatan, kendaraan, dan transportasi misalnya.
 - 5) Kapital manusia menunjuk pada keterampilan yang ada (dimiliki) oleh pengurus, pengelola dan anggota dalam melaksanakan kegiatan koperasi. Dalam banyak kasus keterampilan ini bermula dari bekal seadanya, lalu berkembang melalui akumulasi pengalaman dari berbagai pelatihan yang disiapkan / dilaksanakan secara internal oleh kopwan, maupun pihak eksternal seperti pemerintah maupun pihak swasta.
 - 6) Dari semua kasus yang diteliti secara kualitatif, aspek KS menghasilkan KF dan KM. Dalam realitanya ketiga aspek tersebut saling bersinergi sehingga menghasilkan kinerja koperasi yang ada seperti saat ini.
- 2.
3. Rekapitalisasi menunjuk pada pengembangan KS, KF dan KM yang mendukung kegiatan-kegiatan berkoperasi.
 - 1) Rekapitalisasi KS dalam konteks keberadaan koperasi menunjuk pada usaha atau kegiatan dalam bentuk berbagai kegiatan usaha seperti kegiatan simpan

pinjam, waserda, jasa, dll, yang bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja koperasi.

- 2) Rekapitalisasi KF menunjuk pada pengembangan sarana dan prasarana untuk kegiatan koperasi yang semakin hari semakin besar. Kadang-kadang terjadi proses diversifikasi. Hal ini misalnya dicontohkan kegiatan simpan pinjam yang berkembang menjadi grosir untuk anggota koperasi yang memiliki usaha skala kecil dan menengah.
- 3) Rekapitalisasi KM menunjuk pada pengembangan kemampuan sumberdaya manusia dan manajerial bagi para pengelola dengan mengikuti berbagai macam kegiatan penataran, pelatihan, training, dll yang dilaksanakan baik oleh internal koperasi maupun pihak eksternal seperti pemerintah (dinas koperasi provinsi, kota / kabupaten), dan pihak-pihak lainnya.
4. Kesejahteraan anggota (termasuk pengurus dan pengelola) menunjuk pada apa yang mereka peroleh selama menjadi anggota koperasi, baik karena kemudahan memperoleh pinjaman usaha, maupun perolehan SHU (Sisa Hasil Usaha) dan bentuk lainnya seperti kepuasan anggota.

Permasalahan kedua yang menunjuk pada dekapitalisasi (terjadi di beberapa kasus) dalam bidang sosial, manusia dan fisik.

1. Dekapitalisasi dalam bidang KS (disingkat dekapitalisasi sosial) menunjuk pada proses berkurangnya KS dalam koperasi yang berakibat inefisiensi dan inefektifitas. Hal tersebut diantaranya disebabkan karena faktor berkurangnya kepercayaan anggota pada pengurus atau pengelola dan sebaliknya/ Hal tersebut merupakan contoh yang ditemukan dalam beberapa studi kasus yang diteliti.
2. Dekapitalisasi manusia secara teoretik jarang ditemukan. Tetapi secara relatif dekapitalisasi dapat terjadi ketika keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani kegiatan koperasi yang semakin kompleks dinilai kurang mencukupi lagi. Konsep *relative deprivation* lebih cocok untuk menjelaskan proses dekapitalisasi ini.
3. Dekapitalisasi fisik menunjuk pada berkurangnya daya layan sarana fisik yang diperlukan untuk kegiatan organisasi perkoperasian (*decaying, obsolete*).

Inti pokok permasalahan koperasi yang sudah dijelaskan sebelumnya menyangkut hubungan antara ketiga kapital dengan lingkungan sosial, alam dan manusia. Dengan asumsi bahwa peran KS sangat sentral dalam proses kapitalisasi (kapital sosial, manusia dan fisik), analisis terhadap struktur sosial budaya setempat dan kelompok sosial menjadi sangat penting. Dengan penjelasan mengenai ketiga aspek di atas (KS,KF,KM) nampak konsep-konsep tersebut sangat relevan untuk menjelaskan kondisi kopwan yang ada saat ini khususnya pada studi kualitatif.

BAB III

TEMUAN DAN ANALISIS

Bab III ini berisi temuan lapangan dan analisis yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: 1) temuan dan analisis kuantitatif dan 2) temuan dan analisis kualitatif. Pada bagian pertama berisi hasil pengolahan data kuantitatif berupa data deskriptif mengenai kopwan dan juga analisisnya. Sementara pada bagian 2 berisi gambaran 10 studi kasus kopwan. Gambaran studi kasus meliputi bagaimana masing-masing kopwan di dalam propinsi yang berbeda membangun basis sosialnya, proses kapitalisasi, rekapitalisasinya dalam konteks keberadaan dan keberlanjutan masing-masing kopwan.

3.1. Temuan Lapangan dan Analisis Kuantitatif

a. Jumlah Kopwan di Indonesia Hasil pendataan terhadap koperasi di 31 Propinsi di Indonesia memperlihatkan bahwa total jumlah koperasi wanita (kopwan) yang ada saat ini berjumlah 1.517 buah kopwan. Secara detail sebaran jumlah kowan per propinsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.1.

TABEL 3.1.
SEBARAN JUMLAH KOPERASI WANITA PER PROPINSI
DI 31 PROPINSI DI INDONESIA

No	Propinsi	Jumlah
1	Aceh	94
2	Ambon	10
3	Bali	17
4	Bangka Belitung	21
5	Banten	25
6	Bengkulu	39
7	DKI Jaya	49
8	Gorontalo	20
9	Jambi	46
10	Jawa Barat	195
11	Jawa Tengah	96
12	Jawa Timur	213
13	Kalimantan Barat	20
14	Kalimantan Selatan	46
15	Kalimantan Tengah	22
16	Kalimantan Timur	42
17	Lampung	60
18	Maluku Utara	8
19	NTB	57
20	NTT	30
21	Papua	36
22	Riau	63
23	Sulawesi Barat	8
24	Sulawesi Selatan	38
25	Sulawesi Tengah	31
26	Sulawesi Tenggara	11
27	Sulawesi Utara	58
28	Sumatera Barat	40
29	Sumatera Selatan	50
30	Sumatera Utara	45
31	Yogyakarta	28
Total		1517

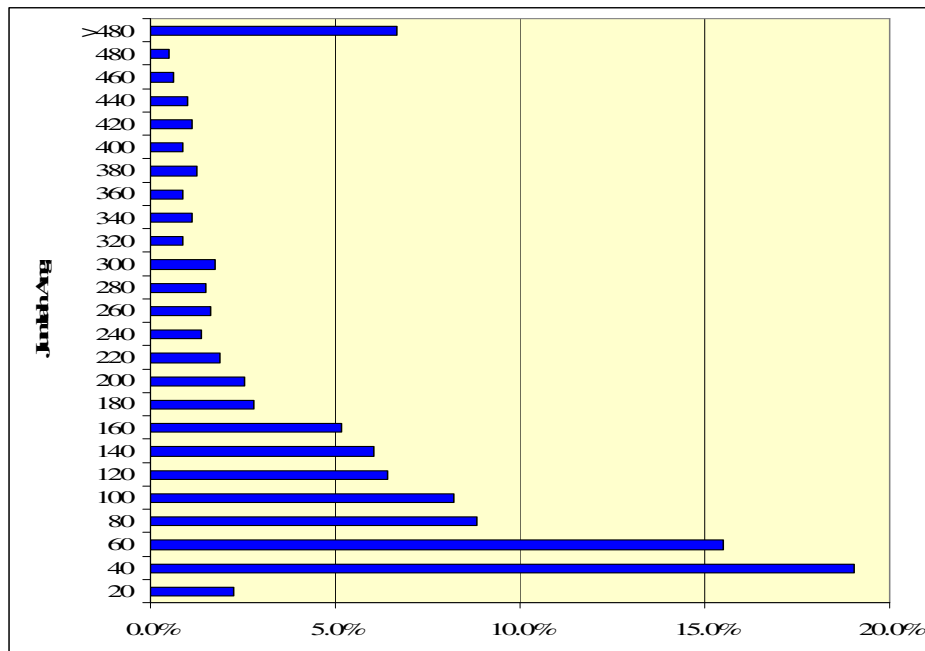
Data primer per 6 Desember 2006

Berdasarkan tabel tersebut, nampak bahwa jumlah kopwan terbanyak ada di Propinsi Jawa Timur yaitu 213 kopwan, sementara kopwan yang jumlahnya paling sedikit terdapat di Maluku Utara yaitu hanya 8 buah. Sekilas dari sisi jumlah kopwan di masing-masing propinsi menggambarkan adanya kesenjangan antara jumlah kopwan yang ada di Jawa dan luar Jawa. Untuk Jawa secara umum menunjukkan jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan jumlah kopwan di propinsi-propinsi lain. Hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah kopwan di Jateng yaitu 96 kopwan dan Jabar 191 kopwan. Hal tersebut diduga karena jumlah penduduk yang ada di Jawa lebih besar dibanding dengan propinsi-propinsi lain sehingga kebutuhan terhadap keberadaan kopwan juga jauh lebih tinggi di Jawa dibandingkan dengan propinsi-propinsi lainnya. Realitas tersebut juga dapat dipengaruhi oleh faktor intensitas pembinaan dari lembaga yang berkompeten sehingga dorongan untuk membangun kopwan jauh lebih tinggi di Jawa dibandingkan dengan propinsi-propinsi lainnya. Namun dari gambaran jumlah kopwan yang ada dapat ditelusuri lebih lanjut faktor yang menyebabkan kesenjangan jumlah kopwan di Jawa dan Luar Jawa lebih jauh.

Jumlah Anggota Kopwan di Indonesia

Hasil pendataan dari studi ini menunjukkan bahwa total jumlah anggota koperasi di 31 Propinsi di Indonesia adalah: 220.740 orang. Rata-rata anggota per koperasi sebanyak 205 orang. Detail kecenderungan jumlah anggota kopwan dalam dilihat dalam Gambar 3.1. berikut ini:

GAMBAR 3.1.
 PERSENTASE JUMLAH ANGGOTA KOPERASI



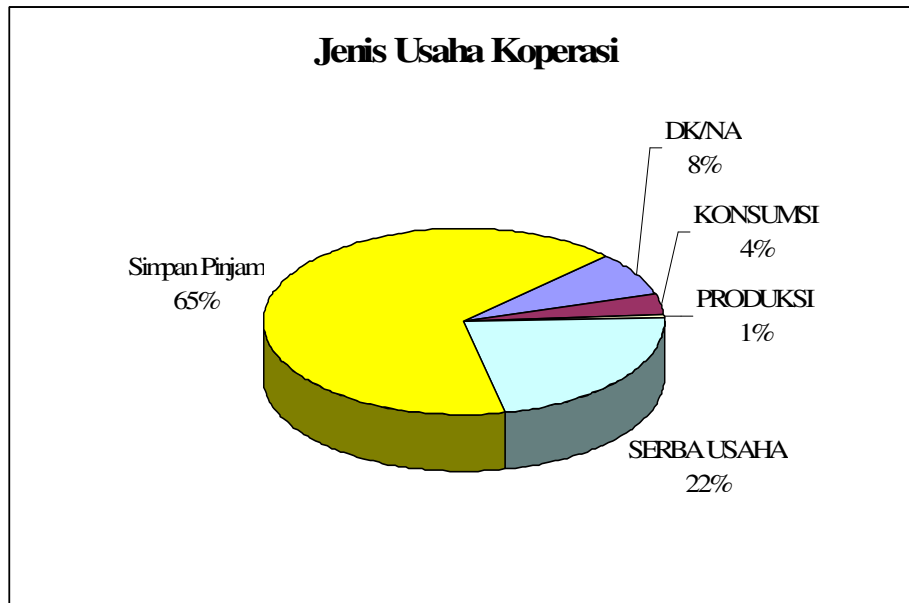
Sumber: Data Primer

Berdasarkan gambar tersebut nampak bahwa jumlah anggota kopwan terbesar beranggotakan antara 40 – 160 orang yaitu kurang lebih sekitar 71 persen. Dari gambar tersebut juga menunjukkan kecenderungan bahwa kopwan dengan jumlah anggota yang besar (lebih di atas 180 anggota kopwan) persentasenya semakin kecil. Artinya jika skala kopwan ditentukan berdasarkan jumlah anggotanya maka jumlah kopwan dengan skala yang besar persentasenya kecil. Dengan kata lain jumlah kopwan yang berhasil menjadi besar (dari sisi jumlah anggotanya) di Indonesia kecil jumlahnya.

b. Jenis Usaha Kopwan di Indonesia

Hasil penelitian ini menunjukkan keragaman kopwan dilihat dari sisi jenis usaha yang digelutinya. Gambaran tentang persentase jenis usaha kopwan yang ada dapat dilihat pada Gambar 3.2. berikut ini :

GAMBAR 3.2.
 PERSENTASE KOPWAN BERDASARKAN JENIS USAHA



Sumber: Data Primer

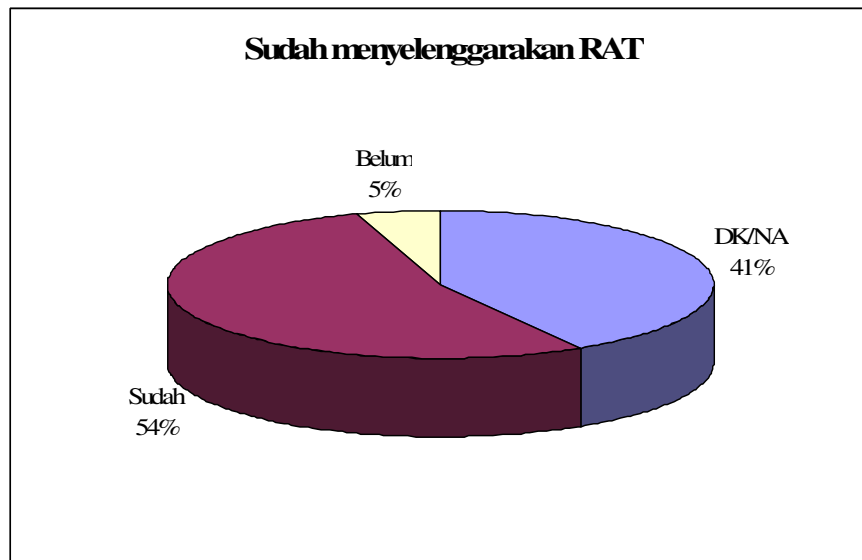
Berdasarkan Gambar 3.2. di atas menunjukkan bahwa dari total jumlah kopwan yang ada, jenis kegiatan kopwan yang terbanyak adalah jenis kegiatan simpan pinjam (65 persen), Serba Usaha (22 persen), Konsumsi (4 persen), Produksi (1 persen) dan 8 persen lainnya tidak memberikan data. Didukung oleh hasil penelitian kualitatif memperlihatkan bahwa pada umumnya kopwan mengawali kegiatannya dengan unit simpan pinjam, kemudian mengembangkan usahanya ke serba usaha dengan berbagai kegiatan seperti; pengadaan berbagai kebutuhan pokok dalam waserda, usaha produksi (misalnya batik) dan kredit konsumsi (kredit yang lebih khusus untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak sekolah, sakit), kegiatan jasa (pendidikan; pendirian TK/Taman Kanak-Kanak). Kecenderungan jenis usaha tersebut menunjukkan tidak saja jenis usaha tersebut secara ekonomi menguntungkan tetapi juga sekaligus menggambarkan kebutuhan riil dari sebagian besar perempuan anggota koperasi.

c. Gambaran Status Kopwan di Indonesia

Temuan lain dari penelitian ini adalah gambaran mengenai status kopwan di Indonesia. Gambaran status kopwan dalam hal ini diindikasikan dengan penyelenggaraan RAT

(Rapat Anggota Tahunan). Secara teoritik RAT merupakan salah satu indicator untuk menunjukkan aktif tidaknya sebuah koperasi karena dalam RAT-lah partisipasi anggota dapat dilihat untuk dapat merumuskan dan memutuskan berbagai keputusan penting berkaitan dengan keberadaan dan keberlanjutan sebuah koperasi. Gambaran status berdasarkan penyelenggaraan RAT dapat dilihat secara detail dalam Gambar 3.3. berikut:

GAMBAR 3.3.
PERSENTASE JUMLAH KOPERASI YANG SUDAH MENYELENGGARAKAN RAT



Sumber: Data Primer

Jika status aktif koperasi diantaranya dicirikan dengan sudah atau belumnya satu koperasi yang menyelenggarakan RAT, maka kopwan yang aktif berjumlah 59 persen yaitu terdiri dari 55 persen kopwan yang telah berhasil menyelenggarakan RAT dan 5 persen lainnya aktif tetapi belum menyelenggarakan RAT. Sementara sisanya sebesar 41 persen tidak memberikan datanya sehingga sulit untuk memperkirakan apakah dari data tersebut sudah menyelenggarakan RAT tetapi tidak memberikan informasinya atau memang koperasi tersebut sama sekali tidak menyelenggarakan RAT atau tidak aktif.

d. Modal Kopwan di Indonesia

Secara umum, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal luar. Berdasarkan hasil pendataan ini memperlihatkan bahwa total modal kopwan di 31 propinsi berjumlah Rp 831 milyar (modal sendiri dan modal luar). Jika dipecah berdasarkan modal sendiri dan modal luar nampak bahwa total modal sendiri berjumlah Rp 426.056.204.000 atau (51,24 persen). Sementara total modal luar berjumlah Rp 405.507.288.000 atau sebesar (48,76 persen). (Lihat Gambar 3.4. dan Gambar 3.5.)

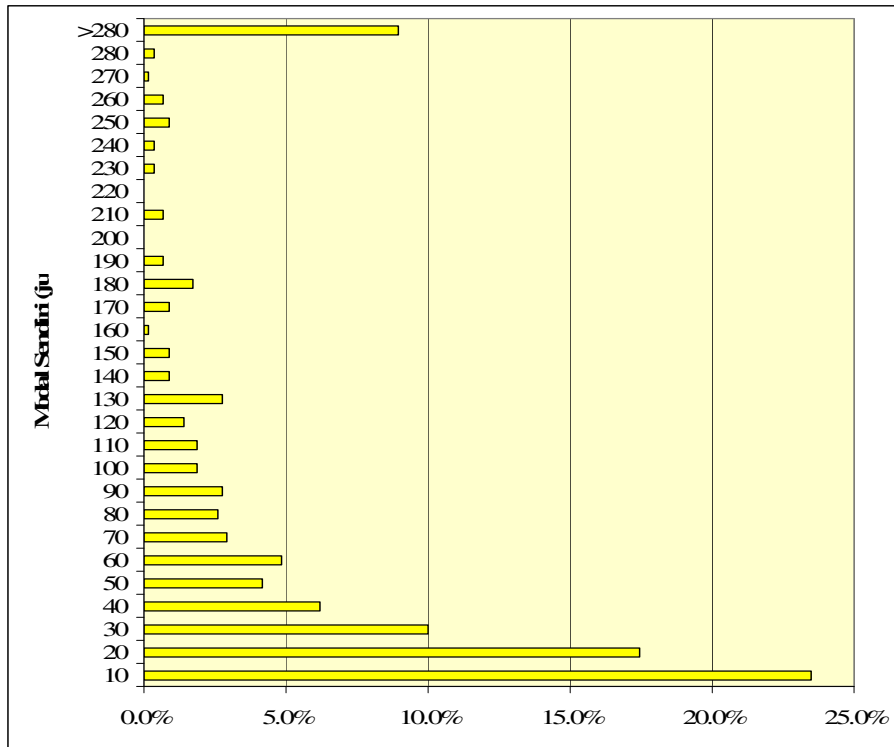
Jika dilihat dari struktur permodalan kopwan yang ada saat ini menunjukkan kondisi yang cukup baik karena perbandingan modal sendiri masih relative lebih besar dibandingkan dengan modal luar, meskipun persentase perbedaannya kecil. Jumlah modal sendiri terbesar terdapat di Kowan Kartika Chandra (Jawa Timur) yaitu sebesar Rp 20.448.731.000, sementara modal sendiri terkecil terdapat di Kopwan PKK Mekar Ayu, Aceh Tengah yang jumlahnya hanya mencapai Rp 108.000. Data lain yang mendukung bahwa kopwan dengan modal terkecil di Aceh baru berusia 2,4 tahun. Diduga kopwan ini baru berdiri pasca tsunami sehingga pemupukan modal yang dimiliki masih sangat kecil karena kemampuan ekonomi anggota kopwannya masih belum kuat.

Dari jumlah modal yang saat ini dimiliki kopwan menunjukkan bahwa pemupukan modal yang terjadi di kopwan relatif kecil dan berjalan lambat. Berdasarkan dukungan hasil penelitian kualitatif pada 10 studi kasus menunjukkan bahwa pemupukan modal yang rendah di tingkat koperasi disebabkan karena variasi simpanan pokok rata-rata kopwan yang relatif kecil. Dari hasil penelitian kualitatif ditemukan bahwa variasi simpanan pokok kopwan secara rata-rata rendah berkisar Rp 1.000–Rp 20.000. Meskipun memang ada kopwan yang jumlah simpanan pokoknya relative besar berkisar antara Rp 500.000 – Rp 1 juta seperti yang terjadi di kopwan di Ambon dan Jawa Timur.

Sementara untuk posisi modal luar terbesar dimiliki oleh Koperasi Teratai, yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan yang berjumlah Rp 4,460.milyar. Sementara jumlah modal luar terkecil dimiliki oleh Koperasi Mawar, Bondowoso (Jatim) yaitu sebesar Rp 192.000. Pada umumnya sumber modal luar diperoleh dari bank, dana bergulir (bantuan pemerintah) diantaranya dari program agribisnis dan dana subsidi BBM. Detail

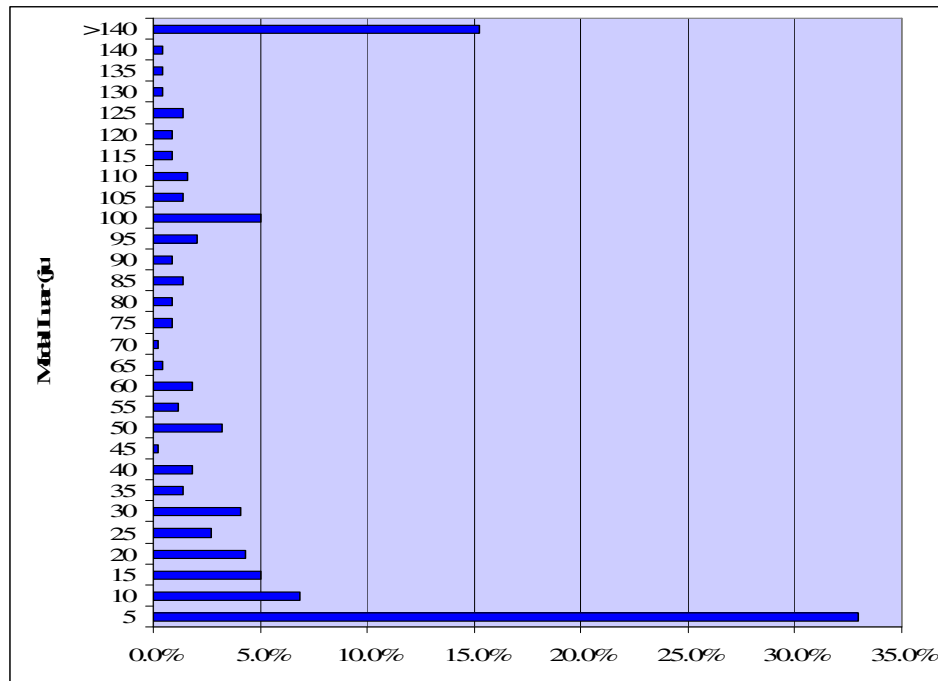
gambaran tentang modal sendiri dan modal luar dapat dilihat pada gambar 3.4. dan 3.5. berikut ini :

GAMBAR 3.4.
PERSENTASE KEPEMILIKAN MODAL SENDIRI



Sumber: Data Primer

GAMBAR 3.5.
 PERSENTASE KEPEMILIKAN MODAL LUAR

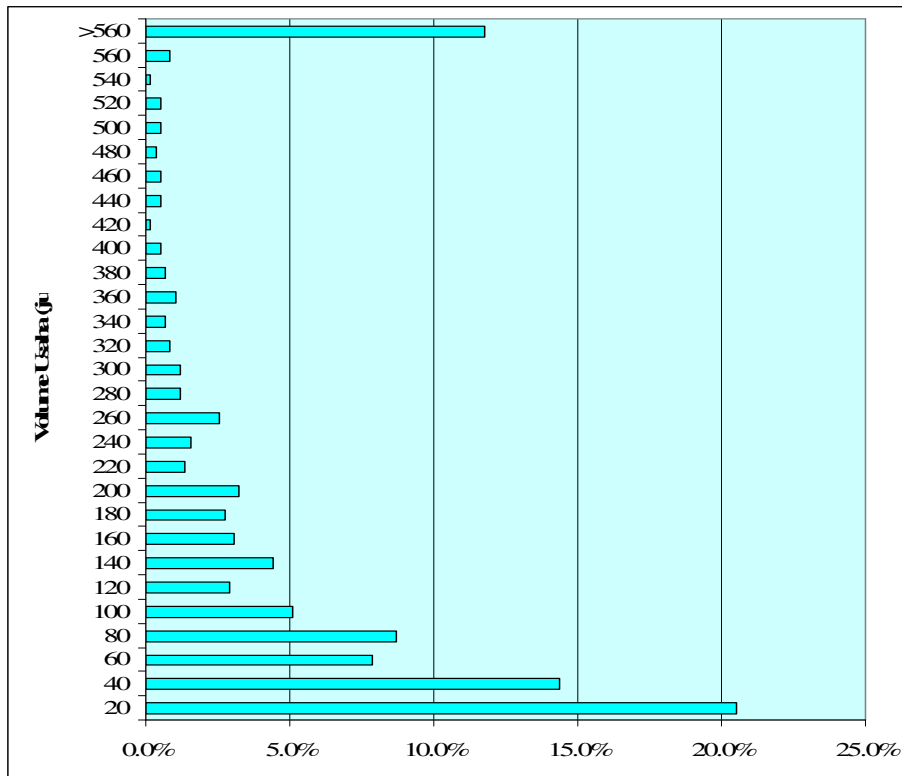


Sumber: Data Primer

e. Volume Usaha Kopwan di Indonesia

Hasil penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai besar volume usaha dari kopwan di Indonesia. Detail gambaran mengenai besaran volume usaha dapat dilihat pada Gambar 3.6. berikut:

GAMBAR 3.6.
PERSENTASE VOLUME USAHA



Sumber: Data Primer

Total volume usaha dari seluruh kopwan di 31 propinsi sebesar Rp 1.401 trilyun. Volume usaha rata-rata per koperasi 1,856 juta. Dari gambar 6 di atas nampak bahwa persentase tertinggi (kurang lebih 21 persen) adalah kopwan dengan besaran volume usaha 20 jutaan dan 40 jutaan (sekitar 14 persen) dan volume usaha lebih dari 560 jutaan sekitar (12 persen). Sementara persentase volume usaha kopwan lainnya sangat variatif berkisar antara Rp 60 jutaan –Rp 560 jutaan. Dengan gambaran besaran volume usaha yang dimiliki kopwan tersebut hampir sama dengan besaran usaha yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah.

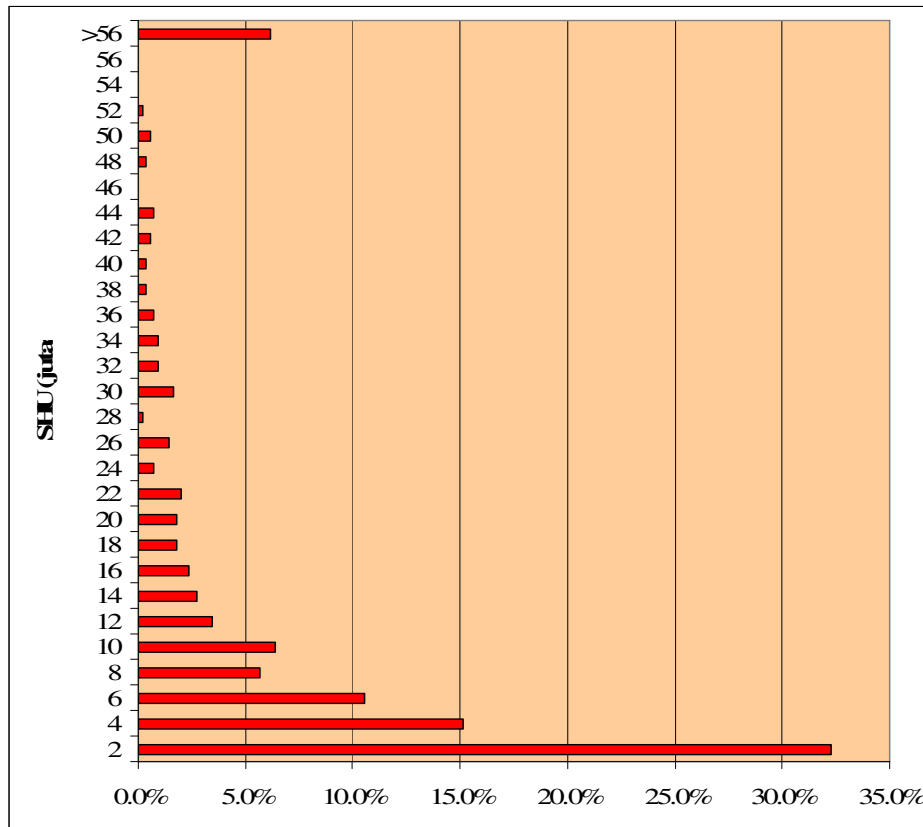
Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa volume usaha terbesar ada di Kopwan Kartika Chandra – Jatim sebesar Rp 110 milyar. Sementara volume usaha terkecil dimiliki oleh Kopwan Mawar – Jabar, sebesar Rp 208 ribu. Kopwan dengan volume

usaha terkecil ada pada kopwan beranggotakan 25 orang dengan usia koperasi 7,7 tahun. Data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan yang mendasar yang dimiliki kopwan dalam pengelolaan usaha sehingga dengan jumlah usia yang relative tidak muda namun volume usaha yang dimilikinya masih sangat kecil.

f. Sisa Hasil Usaha (SHU) Kopwan di Indonesia

Salah satu indikator keberhasilan dari sebuah koperasi dapat dilihat dari besaran SHUnya. Besaran SHU tidak saja menunjukkan aktivitas koperasi, partisipasi dan kontribusi anggota koperasi terhadap kegiatan koperasi tetapi juga keuntungan koperasi yang dapat dibagikan dan dinikmati anggota kopwan. Total SHU kopwan yang ada di 31 propinsi sebesar Rp 118 milyar dengan rata-rata SHU per koperasi sebesar Rp172 juta atau kira-kira 11 persen. Gambaran detail mengenai besaran SHU kopwan di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3.7. berikut ini:

GAMBAR 3.7.
 PERSENTASE JUMLAH SHU (SISA HASIL USAHA) KOPWAN



Sumber: Data Primer

Berdasarkan Gambar 3.7. di atas memperlihatkan bahwa persentase terbesar (sekitar 33 persen) kopwan memiliki SHU hanya sekitar Rp 2 juta, 15 persen memiliki SHU sekitar 4 jutaan dan sekitar 11 persen memiliki SHU sekitar 6 jutaan. Sementara persentase sisanya sangat terpecah dan bervariasi besaran SHUnya antara Rp 8 juta sampai dengan Rp 56 juta.

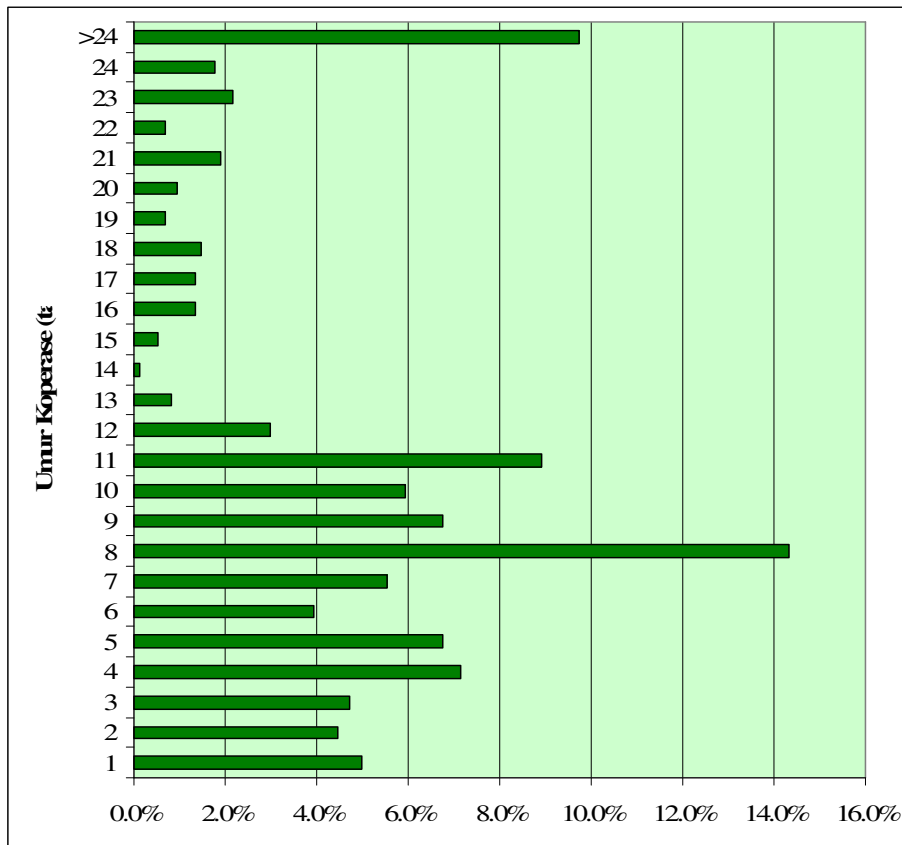
Jika dilihat prosentase terbesar SHU kopwan yang hanya berkisar antara 2-6 jutaan menunjukkan bahwa nilai SHU kopwan masih sangat kecil. Artinya pula bahwa nilai balik yang dapat dinikmati oleh anggota kopwan juga relative masih rendah. Hasil studi kualitatif memperlihatkan bahwa kecenderungan jumlah SHU yang rendah disebabkan karena sebagian besar kegiatan koperasi –khususnya simpan pinjam—belum dikelola secara professional dengan orientasi keuntungan ekonomi yang tinggi bagi kopwan dan

anggotanya. Sebagian besar kegiatan simpan pinjam menetapkan tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan institusi kredit lainnya yang ada; perbankan maupun non perbankan. Dalam konteks ini kecenderungan pengurus kopwan berpandangan bahwa koperasi harus lebih dapat memberikan keuntungan kepada anggota yang membutuhkan dibandingkan dengan mengakumulasi keuntungan dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang cepat. Hal ini terbukti dari hasil studi kualitatif yang menunjukkan bahwa pada sebagian besar studi kasus yang diambil menunjukkan kecenderungan kegiatan kopwan yang lebih berorientasi pada kegiatan-kegiatan social. Hal tersebut diwujudkan dengan pemberian bunga rendah pada anggota kopwan yang melahirkan, bunga nol persen untuk anggota yang mengalami musibah seperti kematian. Namun hasil konfirmasi dari anggota kopwan menunjukkan bahwa hal-hal tersebut merupakan kebutuhan riil anggota kopwan dan kebijakan yang ditetapkan demikian dianggap sangat membantu kepada kebutuhan riil perempuan.

g. Umur Kopwan di Indonesia

Hasil penelitian lain yang menarik adalah gambaran tentang rentang umur kopwan yang ada di Indonesia. Detail rentang umur kopwan di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3.8. berikut ini:

GAMBAR 3.8.
PERSENTASE UMUR KOPERASI



Sumber: Data Primer

Dari hasil Gambar 3.8. di atas nampak bahwa persentase kopwan yang didata menunjukkan usia 8 tahun (sebesar lebih dari 14 persen), di atas 24 tahun sebanyak hampir 10 persen dan usia 11 tahun sebanyak kurang lebih 9 persen. Sementara persentase sisanya tersebar diantaranya. Jika diamati lebih jauh dari gamabr 7 tersebut

maka persentase yang terbesar ada pada kopwan yang berusia antara 1 sampai 11 tahun. Kemudian sisanya tersebar dalam persentase yang kecil-kecil antara rentang usia 12 sampai 24 tahun. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa jumlah kopwan yang mampu bertahan mencapai usia 12 sampai 24 tahun relative kecil. Ada berbagai kemungkinan yang harus ditelusuri lebih jauh berkaitan dengan gambaran tersebut. Apakah usia 11 tahun merupakan titik rawan bagi kopwan dimana tidak banyak kopwan yang mampu bertahan pada usia tersebut? Jika kondisinya memang demikian maka hal ini menjadi catatan khusus bagi pemerintah maupun lembaga-lembaga lain yang memiliki concern pada perkembangan kopwan di Indonesia. Dalam konteks tersebut mungkin dibutuhkan upaya pendampingan secara khusus pada usia-usia kopwan tertentu.

h. Jumlah Manager Kopwan di Indonesia

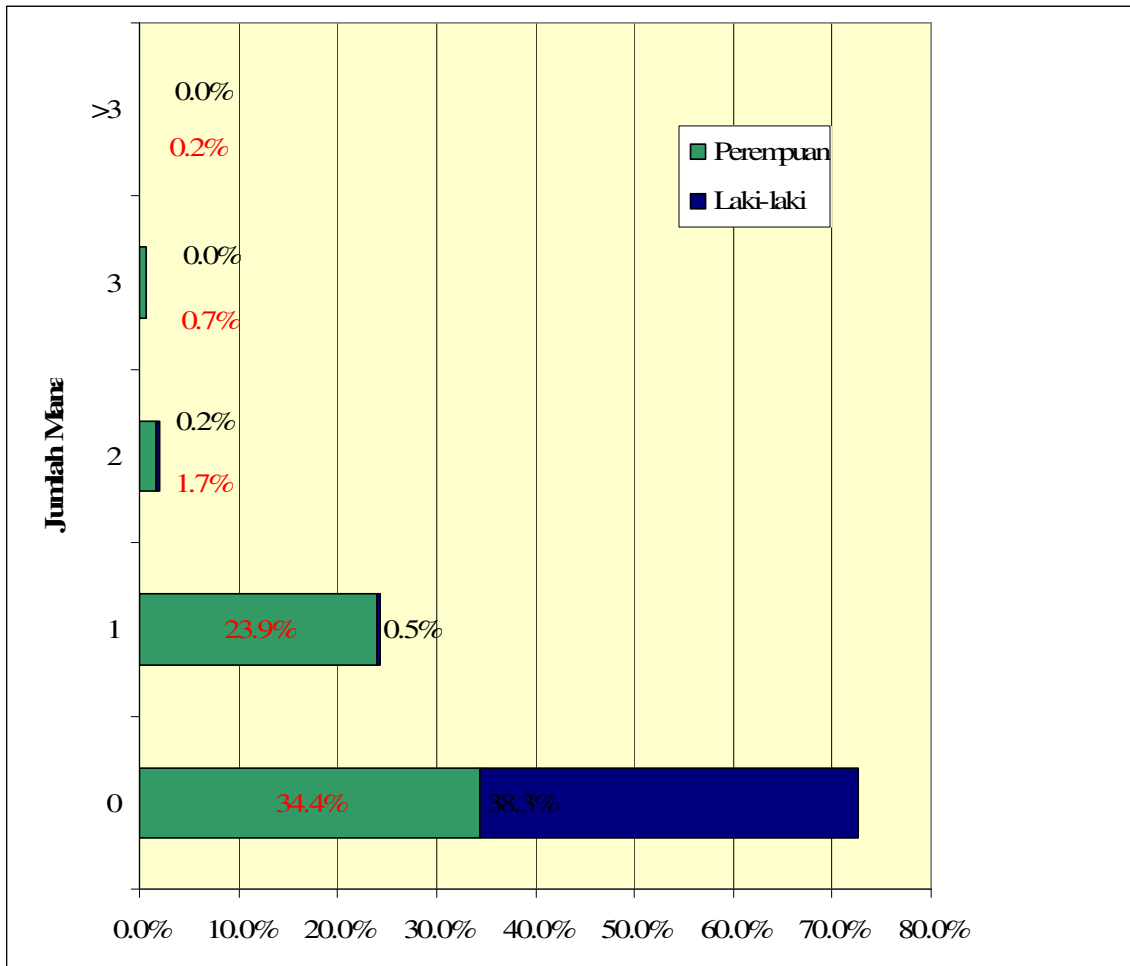
Temuan lain dari penelitian ini mengenai keberadaan manager di kopwan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 70 persen lebih kopwan tidak memiliki manager, sementara 23,95 persen memiliki 1 (satu) orang manager dan 1,9 persen memiliki 2 orang manager. Dengan kata lain hanya 334 kopwan dari total kopwan yang berjumlah 1496 yang memiliki manager. Dari gambaran data tersebut mengartikan bahwa sebagian besar kopwan saat ini tidak atau belum memiliki manager yang direkrut secara khusus. Namun bukan berarti bahwa kopwan yang ada di Indonesia tidak menjalankan satu manajemen tertentu.

Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa manajemen kopwan saat ini umumnya dijalankan oleh pengurus baik secara *full time* maupun *part time*. Melalui kerja-kerja pengurus dan sebagian anggota (khususnya ketua kelompok pada koperasi yang mengembangkan strategi kelompok) manajemen kopwan saat ini dijalankan. Sejauh ini dengan mekanisme yang dikembangkan manajemen koperasi (khususnya pada kopwan yang dijadikan studi kasus) dapat berjalan dengan baik.

Keberadaan manager yang direkrut secara khusus umumnya ada pada koperasi yang skala usaha dan anggotanya cukup besar. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif menunjukkan

bahwa manajer pada sebuah koperasi yang sudah mapan diorientasikan untuk mengembangkan unit-unit usahanya agar berjalan lebih professional dan menguntungkan. Gambaran tentang persentase kopwan dan jumlah manajer dapat dilihat pada Gambar 3.9. berikut ini:

GAMBAR 3.9.
JUMLAH MANAGER KOPWAN

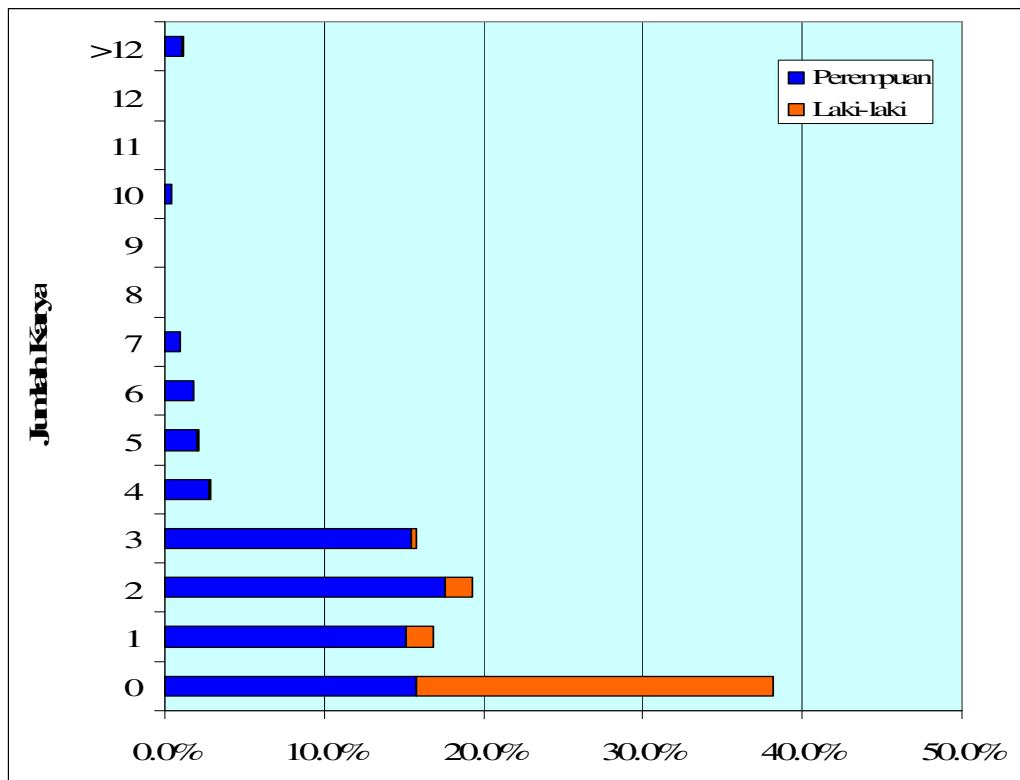


Sumber: Data Primer

i. Jumlah Karyawan Kopwan di Indonesia

Gambaran jumlah karyawan perempuan dan laki-laki yang terserap di kopwan secara detail dapat dilihat di Gambar 3.10. berikut ini:

GAMBAR 3.10.
PERSENTASE JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN DI KOPWAN



Sumber: Data Primer

Berdasarkan Gambar 3.10. di atas menunjukkan beberapa temuan yang menarik. Pertama, jumlah total tenaga kerja/karyawan yang bekerja di kopwan sebanyak 1760 orang. Artinya kopwan memiliki peranan tidak saja memberikan keuntungan kepada anggotanya tetapi juga dalam hal penyerapan tenaga kerja. Kedua, meskipun statusnya sebagai kopwan, namun tenaga kerja/karyawan yang bekerja di kopwan juga menyerap tenaga kerja/karyawan laki-laki. Perbandingan jumlah karyawan perempuan sebesar 1576 karyawan atau (89,5 persen), sementara jumlah total karyawan laki-laki yaitu 184 orang

atau sebesar 10, persen. Dukungan dari studi kualitatif menunjukkan bahwa pada umumnya tenaga kerja/ karyawan laki-laki dipekerjakan sebagai petugas lapangan atau *debt collector*. Sementara tenaga kerja /karyawan perempuan sebagian besar bekerja di bagian administrasi pembukuan atau keuangan. Pada umumnya karyawan memperoleh pendapatan yang cukup bervariasi berkisar antara Rp 400.000 – Rp 700.000.

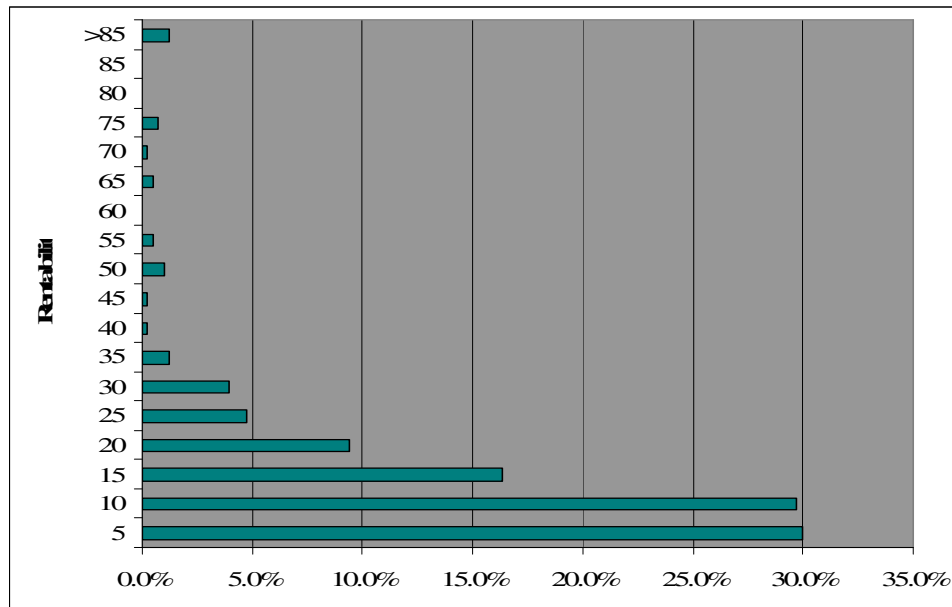
Hasil penelitian kualitatif juga menunjukkan bahwa selain menyerap tenaga kerja/karyawan tetap, kopwan juga mempekerjakan petugas/karyawan tidak tetap. Mereka biasanya difungsikan sebagai petugas lapangan part time/pendamping. Pada beberapa koperasi tenaga kerja/karyawan tidak tetap memperoleh uang transport pada saat melakukan kunjungan ke per kelompok (Rp 40.000–Rp 75.000) per kali datang/kelompok. Sayangnya tidak ada data yang sistematis yang menunjukkan jumlah tenaga kerja/karyawan tidak tetap. Dari hasil pengamatan selama studi kualitatif memperlihatkan kecenderungan bahwa jumlah tenaga kerja/ karyawan tidak tetap lebih besar dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja/karyawan tetap. Artinya bahwa keberadaan kopwan cukup berarti dalam hal penyerapan tenaga kerja khususnya tenaga kerja/karyawan lokal.

j. Gambaran Tentang Keuangan Kopwan di Indonesia

Secara kuantitatif, penelitian ini juga berusaha untuk mengolah data yang berkaitan dengan keuangan koperasi yang terdiri dari rentabilitas, solvabilitas dan likuiditas. Data tersebut merupakan hasil dari cross beberapa variable. Sayangnya dari yang terkumpul, hanya data mengenai rentabilitas yang dapat dikeluarkan. Data yang dihasilkanpun nampaknya tidak dapat menggambarkan kondisi riil yang sebenarnya karena kondisi beberapa data yang tidak baik. Ada banyak kekosongan data (yang tidak diisi oleh koperasi maupun dinas koperasi di tingkat Propinsi dan Kabupaten) yang tidak memungkinkannya data mengenai solvabilitas dan likuiditas untuk dapat ditampilkan. Data rentabilitas yang berhasil diolah dapat dilihat pada Gambar 3.11. di bawah ini:

GAMBAR 3.11.

PERSENTASE RENTABILITAS KOPWAN



Sumber: Data Primer

Rentabilitas idealnya dapat menunjukkan kemampuan kopwan untuk dapat menghasilkan keuntungan. Berdasarkan gambar di atas nampak bahwa terbesar kopwan menunjukkan rentabilitas sebesar 5-10 persen saja untuk hampir 60 persen kopwan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan kopwan untuk dapat menghasilkan keuntungan masih sangat rendah. Kondisi kopwan yang ada saat ini cenderung berjalan namun tidak memberikan akumulasi keuntungan yang besar bagi kopwan. Dalam jangka panjang hal ini penting menjadi perhatian, tidak saja secara internal untuk kopwan tetapi juga untuk pembina koperasi dan lembaga yang berkompeten membinanya. Perlu dilakukan pelatihan-pelatihan pengembangan usaha sehingga kemampuan kopwan untuk mengembangkan usaha dapat ditingkatkan dari kondisi saat ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian ini maka secara kuantitatif, hasil penelitian ini menunjukkan gambaran sebagai berikut

- a. Jumlah koperasi tahun 2006 di 31 propinsi adalah 1517 kopwan. Tertinggi jumlah kopwan terdapat di Propinsi Jatim sebanyak 212 koperasi. Sementara yang terkecil jumlahnya terdapat Maluku Utara yang hanya berjumlah 8 kopwan.
- b. Dari keseluruhan jumlah kopwan yang didata termasuk dalam kategori aktif yaitu bahwa kopwan tersebut secara rutin-baik pengurusnya, anggotanya, dan kegiatan-kegiatannya berjalan secara rutin. Namun jika dilihat seberapa banyak kopwan yang telah melaksanakan RAT, data memperlihatkan bahwa kopwan yang telah menyelenggarakan RAT berjumlah 52 persen dan 48 persen tidak memberikan datanya. Dari angka 48 persen tersebut artinya bahwa kopwan tersebut bias telah melaksanakan RAT tetapi tidak memberikan datanya, atau memang belum melaksanakan RAT dan tidak memberikan datanya. Ketiadaan data yang memadai mengenai posisi koperasi dalam penyelenggaraan RAT di propinsi-propinsi tertentu (lihat lampiran) mengindikasikan kelemahan dinas koperasi kabupaten/kota untuk memantau dan mengontrol koperasi yang berada di bawah koordinasinya, sehingga dapat memiliki data perkembangan koperasi yang terbaru.
- c. Jenis usaha koperasi terbanyak adalah simpan pinjam (56,11 persen), serba usaha (23,11 persen), produksi (0,31 persen), konsumsi (1,39 persen), tidak ada data (19,09 persen).
- d. Total jumlah anggota koperasi di 31 propinsi berjumlah 220.740 orang dengan rata-rata anggota per kopwan adalah kurang lebih 205 orang.
- e. Total modal yang dimiliki kopwan yang tercatat kurang lebih Rp 831 milyar, dalam hal ini termasuk modal sendiri dan modal luar.

- f. Total modal sendiri berjumlah kurang lebih Rp 426 milyar atau sekitar 51,24 persen dari total modal kopwan. Jumlah modal sendiri terbesar ada di Kopwan Kartika Chandra (Jawa Timur) sebesar Rp 20.449 milyar
- g. Total modal luar berjumlah sekitar Rp 405.5 milyar atau sekitar 48,76 persen. Modal luar terbesar terdapat pada kopwan yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, dengan modal luar sebesar Rp 4,460.milyar. Sumber modal yang teridentifikasi dari penelitian ini berasal dari : bank, dana bergulir (bantuan pemerintah) berupa program agribisnis dan dana subsidi BBM dan lain-lain.
- h. Jumlah koperasi yang memiliki manajer adalah sebanyak 334 koperasi (25,8 persen), sementara sisanya tidak memberikan data. Ketiadaan data memperkuat indikasi kelemahan sistem pemantauan regular terhadap perkembangan kopwan yang dilaksanakan oleh instansi yang terkait. Sedikitnya jumlah koperasi yang memiliki manajer bukan berarti sistem manajemen dalam koperasi tidak berjalan. Sistem manajemen koperasi saat ini pada umumnya dilakukan atau dilaksanakan secara paralel dengan tugas-tugas kepengurusan koperasi.
- i. Total jumlah karyawan di seluruh kopwan (31 propinsi yang disensus) berjumlah 1760, yang terbagi menjadi karyawan perempuan sebanyak 1576 atau (89,5 persen) dan karyawan laki-laki sebanyak 184 atau sekitar (10,5 persen). Di luar karyawan, kopwan juga sebagian merekrut tenaga-tenaga kerja/karyawan paruh waktu yang diduga jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja tetap. Sementara gambaran honor atau pendapatan yang diterima karyawan koperasi (tetap) cukup beragam berkisar antara Rp 400.000,- Rp 700.000,-. Ini menunjukkan bahwa kopwan memiliki peranan tidak saja memberikan keuntungan kepada anggota-anggotanya, akan tetapi juga masyarakat secara umum yang terserap sebagai tenaga kerja. Meskipun statusnya adalah koperasi wanita, dalam penyerapan tenaga kerja juga tidak membedakan klasifikasi gender. Artinya, kopwan juga sangat terbuka bagi kelompok laki-laki untuk terlibat di dalamnya dengan pembagian fungsi tertentu.

- j. Total volume usaha kopwan di 31 propinsi berjumlah Rp 1.401 trilyun. Rata-rata volume usaha per koperasi Rp 1,856 juta. Nilai volume usaha terbesar ada di Kopwan 'Kartika Chandra' Jatim sebesar Rp 110 milyar, sementara volume usaha terkecil Rp 208 ribu ada di Kopwan Mawar Jatim. Data ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan mendasar yang dimiliki kopwan dalam pengelolaan usaha. Jika dilihat dari segi usia kopwan, keberadaan kopwan di Indonesia relatif sudah berlangsung lama, namun volume usaha yang dimiliki masih sangat kecil jika dibandingkan rentang waktu yang telah dilampaui.
- k. Total SHU kopwan di 31 propinsi di Indonesia berjumlah Rp 118 milyar. Rata-rata SHU per koperasi Rp 172 juta atau kira-kira 11 persen. Jumlah SHU yang relative masih rendah mengindikasikan bahwa kopwan secara umum masih mengalami persoalan dalam perkembangan usahanya sehingga akumulasi keuntungan yang diperoleh dari usaha-usaha yang dijalankan kopwan selama ini masih relatif kecil. Dari sini dapat diberikan catatan penting yang perlu diperhatikan bagi pengembangan kopwan di masa mendatang, yakni ada kecenderungan jumlah SHU yang rendah disebabkan oleh kegiatan koperasi sebagian besar belum dikelola secara profesional. Di samping itu, kegiatan kopwan nampak lebih berorientasi pada kegiatan-kegiatan sosial ketimbang upaya pemberdayaan ekonomi anggotanya.
- l. Rentang usia kopwan terbaik yang dijadikan sebagai studi kasus antara 2 tahun sampai dengan yang berusia puluhan tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor usia bukan merupakan faktor penentu keberhasilan sebuah kopwan.
- m. Faktor penentu keberhasilan kopwan lebih ditentukan oleh besarnya partisipasi anggota yang diwujudkan dari kedisiplinan anggota memenuhi kewajibannya dan mengaktifkan kegiatan yang dilakukan oleh kopwan. Dengan partisipasi anggota yang besar keberadaan dan keberlangsungan kopwan dapat dipelihara.

- n. Faktor penentu keberhasilan yang penting pada sebuah kopwan adalah pengurus. Semangat, kerja keras, disiplin, memiliki motivasi untuk maju, komitmen dan transparan pada sisi keuangan menjadi pelajaran penting yang dapat diambil dari 10 studi kasus.
- o. Dukungan karyawan/tenaga kerja menjadi faktor yang juga berpengaruh pada berjalannya kegiatan kopwan sesuai dengan yang seharusnya dan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan suatu kopwan.
- p. Berbagai pelatihan dan studi banding pada banyak kasus kopwan menjadi inspirasi dan motivasi untuk mendorong kemajuan suatu kopwan menjadi berhasil atau lebih berhasil.
- q. Keberhasilan sistem tanggung renteng bukan didasarkan pada sistem tersebut tetapi pada kuat tidaknya solidaritas yang ada pada suatu kelompok. Jika tidak didukung oleh solidaritas yang kuat, sistem tanggung renteng hanya cenderung menguntungkan pihak pengurus kopwan, bukan untuk anggota kopwan. Pengurus kopwan dalam hal ini terlepas dari beban peluang kredit macet, sementara anggota kelompok cenderung mendapatkan beban tambahan baru.
- r. Peranan kopwan di Indonesia tidak saja memberi keuntungan bagi anggotanya, namun juga telah menjadi lembaga yang dapat menyerap tenaga kerja baik tetap maupun paruh waktu dalam jumlah yang cukup besar bagi perempuan maupun laki-laki.
- s. Melalui kopwan, perempuan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas diri. Kegiatan kopwan mampu memberikan perhatian kepada kebutuhan perempuan secara lebih luas; peningkatan ekonomi, kesehatan reproduksi, keterampilan kerja dan keahlian lainnya, peningkatan kualitas pendidikan anak-anak anggota koperasi serta kesehatan keluarga.
- t. Peranan kopwan lebih luas dirasakan oleh komunitas atau masyarakat dimana kopwan tersebut berada. Berbagai jenis usaha –khususnya simpan pinjam—yang diberikan kepada wanita mampu memberikan kontribusi pada tingkat kesejahteraan keluarga, termasuk peningkatan pendidikan anggota keluarga anggota kopwan. Melalui tingkat pendidikan yang lebih

baik, komunitas secara umum mampu melakukan mobilitas vertikal dan memperbaiki tingkat kesejahteraan hidupnya.

- u. Wanita secara umum, dari hasil penelitian kualitatif menunjukkan memiliki tingkat disiplin yang tinggi dalam pengembalian pinjaman. Faktor ini juga menjadi salah satu hal yang menentukan keberhasilan suatu kopwan. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kemacetan pinjaman anggota.

B. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan

Di luar faktor-faktor keberhasilan di atas, kopwan secara umum di Indonesia masih mengalami berbagai persoalan. Persoalan-persoalan yang dapat tertangkap dari kajian ini diantaranya adalah :

- a. Pada beberapa lokasi, kegiatan dan dinamika kopwan masih menemui masalah karena faktor budaya atau adat. Pada kasus Bali misalnya, intensitas kegiatan adat yang tinggi dan harus diikuti oleh perempuan, membuat perempuan tidak lagi memiliki waktu yang cukup untuk aktif di dalam kopwan.
- b. Keberadaan kopwan saat ini dihadapkan pada situasi persaingan yang cukup ketat dari lembaga-lembaga sejenisnya. Beberapa kasus unit waserda kopwan, misalnya yang bangkrut disebabkan karena hadirnya berbagai mini market di tingkat masyarakat. Unit usaha simpan pinjam pun dihadapkan pada persaingan dengan jasa yang diberikan dari lembaga-lembaga lainnya yang berfungsi seperti koperasi.
- c. Secara umum kopwan juga dihadapkan pada persoalan sistem kaderisasi yang lemah. Hal tersebut seringkali juga disebabkan karena tidak banyak perempuan yang memiliki potensi mau terlibat aktif dalam kegiatan kopwan. Hal ini disebabkan karena kegiatan koperasi menyita banyak waktu dengan tingkat keuntungan (honor atau pendapatan) yang tidak besar.
- d. Adopsi teknologi di tingkat kopwan relatif masih rendah. Khususnya penerapan sistem komputerisasi pada sistem administrasi maupun keuangan kopwan. Kopwan secara umum masih cenderung familiar terhadap sistem manual dan konvensional.
- e. Pada kopwan yang skala kegiatannya sudah besar muncul kecenderungan sistem pengurusan yang tertutup. Hal ini nampak dari laporan keuangan dan berbagai kebijakan yang berlaku di dalamnya sebagai informasi yang terbatas untuk pengurus dan anggotanya. Pihak luar tidak diperkenankan untuk mengakses berbagai informasi tersebut meskipun untuk kepentingan saling belajar.

- f. Pada beberapa kopwan nampak munculnya kecenderungan ketergantungan pada bantuan dari pemerintah, meskipun sebenarnya kopwan tersebut dapat mandiri tanpa bantuan pemerintah. Hal tersebut nampak dari harapan-harapan yang muncul yang senantiasa diarahkan kepada pemerintah untuk memperhatikan keberadaan kopwan dengan cara memberikan bantuan keuangan kepada kopwan.

C. Rekomendasi

- a. Kelemahan yang mendasar dari proses penelitian pendataan kopwan adalah ketersediaan data yang akurat mengenai perkembangan kopwan di masing-masing kabupaten dan propinsi. Untuk kepentingan monitoring perkembangan kopwan di Indonesia, sangat penting untuk dibuat format pengisian yang standar dan seragam untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Format pengisian tersebut idealnya dilakukan secara regular dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dalam sebuah payung hukum, sehingga pemerintah senantiasa dipermudah mendapatkan informasi terbaru mengenai perkembangan kopwan di Indonesia untuk kepentingan perumusan dan penetapan kebijakan bagi kopwan. Keberadaan data yang akurat sangat menentukan efektivitas sebuah kebijakan.
- b. Untuk hal pendataan perlu dibangun suatu koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga pemerintah di level kabupaten/kota maupun propinsi. Dalam hal ini perlu penataan birokrasi sehingga pembinaan koperasi benar-benar ditangani oleh individu yang professional dan berkompetan. Sistem *rooling* birokrat di daerah perlu ditinjau efektivitasnya khususnya bagi perkembangan kopwan ke depan. Untuk mendukung koordinasi ini, diperlukan pemutakhiran sistem pendataan/arsip yang bisa diakses langsung antar level pemerintah.
- c. Melalui sistem pendataan kopwan yang lebih sistematis dan baik maka diharapkan perhitungan keuangan kopwan menyangkut rentabilitas, solvabilitas dan likuiditas juga dapat dihitung secara lebih baik dan akurat.

Data tersebut sangat berharga bagi pemerintah untuk menjadi data basis bagi penetapan suatu kebijakan bagi kopwan.

- d. Kopwan secara umum masih sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan yang berkaitan manajemen pengelolaan koperasi secara professional. Kopwan idealnya dikelola secara sistematis, efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Manajemen yang professional juga sekaligus dapat menjadi bekal kopwan bersaing dengan lembaga-lembaga sejenisnya.
- e. Kopwan secara umum masih sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan usaha sehingga kopwan dapat meningkatkan kinerjanya dan memperbesar keuntungan bagi anggotanya. Pengembangan usaha untuk kopwan idealnya tidak saja dikaitkan dengan kebutuhan peranan perempuan (*domestic*) tetapi juga idealnya dikaitkan dengan pengembangan hobi anggota kopwan.
- f. Dalam implementasi sistem tanggung renteng bagi kopwan harus dibarengi dengan sistem asuransi/jaminan bagi anggota kopwan. Dalam hal ini penting dibangun suatu lembaga payung bagi kopwan-kopwan di tingkat propinsi atau pusat dimana lembaga payung tersebut sekaligus berfungsi sebagai penjamin bagi kopwan atau anggota kopwan yang berada di bawahnya.
- g. Perlu dilakukan pendampingan dan pelatihan yang berkaitan dengan sistem kaderisasi di dalam kopwan.
- h. Pemerintah dan lembaga-lembaga yang berkepentingan terhadap perkembangan kopwan sebaiknya secara cermat mempertimbangkan berbagai jenis bantuan yang akan diberikan kepada kopwan. Idealnya bantuan yang diberikan kepada kopwan dapat meningkatkan kinerja kopwan tanpa harus menumbuhkan ketergantungan kopwan terhadap bantuan eksternal. Dalam hal ini pemerintah dapat menetapkan kebijakan pemberian bantuan secara selektif kepada kopwan dengan cara memberikan bantuan (dalam bentuk apapun) kepada kopwan yang belum

pernah menerima bantuan, atau mendapatkan bantuan pemerintah tidak lebih dari 2 jenis bantuan.

- i. Kepada peneliti, pemerhati, dan akademisi untuk menjadikan hasil penelitian ini sebagai bagian dari referensi untuk penelitian selanjutnya demi perbaikan lembaga ekonomi di Indonesia khususnya yang bersifat mikro.